GERAKAN KEMASYARAKATAN
(Studi Tentang Perjuangan Hak Masyarakat Korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Sosiologi**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K D-2010 016 SOS
No. REG : D-2010/SOS/016
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
ABD. MAJID
NIM : BO.530.30.25

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
JULI 2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL

Skripsi yang ditulis oleh Abd. Majid ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2010

Pembimbing

Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. IS
NIP 194907281967121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Abd. Majid ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 15 Juli 2010

Mengesahkan,

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakulta Dakwah

Dekan,

Dr. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

Ketua,

Prof. Dr. H. Shonhadji, Dip, Is

NIP. 194907281967121001

Sekretaris,

Iva Yulianti U. Azzah, S. Sos., M. Si.

NIP. 150409279

Penguji I,

Dra. Hj. Wahidah Z. Br. Siregar, MA. Ph.D.

NIP. 196901051993032001

Penguji II,

Dra. Hj. Nur Mazidah, M.Si.

NIP. 195306131992032001

ABSTRAK

Abd. Majid, NIM. BO5303025, 2010: Gerakan Kemasyarakatan (Studi Tentang Perjuangan Hak Masyarakat Korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Gerakan Kemasyarakatan

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, (2) Bagaimana proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan proses gerakan yang ada pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Mobilisasi Sumber Daya dan Ketegangan struktural.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yang berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kemudian data tersebut dianalisis secara kritis dengan mengunakan teori mobilisasi sumber daya dan ketegangan structural, sehinnga diperoleh hasil dan kesimpulan tentang gerakan kemasyarakatan di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada msyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terjadi menjadi dua bentuk yaitu: (a) Musyawarah (b) Demonstrasi. (2) Proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Ada tiga tahapan proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo dalam menyuarakan aspirasinya dan memperjuangkan haknya yaitu dengan cara (a) Sosialisasi (b) Mobilisasi dan (c) Aksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman judul i
Persetujuan Pembimbing ii
Pengesahan Tim Penguji iii
Motto dan Persembahan iv
Pengantar v
Abstraksi vii
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Difinisi konsep .....
F. Sistematika Pembahasan 6

BAB II KERANGKA TEORITIK 10
A. Kajian Pustaka 10
1. Pengertian Gerakan Kemasyarakatan 10
2. Pola-pola Gerakan Kemasyarakatan 13
B. Kajian Teoritik 14
1. Pemahaman Gerakan Kemasyarakatan pada Aspek Rasional 14
2. Pemahaman Gerakan Dekonstruktif 18
3. Kesinambungan Periode Gerakan 28
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 31

BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi Penelitian 33
C. Jenis dan Sumber Data.....34
1. Data Primer 34
2. Data Skunder.....34
D. Tahap-Tahap Penelitian.....37
1. Tahap Pra lapangan 37
2. Tahap Lapangan 40
3. Tahap Analisis Data 40
E. Tehnik Pengumpulan Data 40
1. Observasi..... 41
2. Wawancara.....42
3. Dokumentasi.....44
F. Tehnik Analisis Data 44
G. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data 45

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....48
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....48
B. Penyajian Data.....53
C. Analisis Data.....68
D. Pembahasan 76

BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan.....88
B. Saran (Rekomendasi).....93
DAFTAR PUSTAKA.....
Lampiran.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Tabel I: Wilayah Kecamatan Porong 49
2. Tabel II: Prasarana Dan Sarana Transportasi 49
3. Tabel III: Prasarana Irigasi 50
4. Tabel IV:Prasarana Pemerintahan 50
5. Tabel V: Prasarana Olah Raga 51
6. Tabel VI: Mata Pencahariaan 51
7. Tabel VII: Nama Desa Dan Kepala Desa 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan swasta yang melakukan pengeboran di desa Jatirejo Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo. Proses pengeboran dilakukan oleh Lapindo Brantas awalnya berjalan sesuai dengan harapan, yang ingin sukses dan lancar, akan tetapi harapan itu berubah menjadi bencana menyemburnya lumpur panas yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Kondisi yang seperti ini memakan beberapa korban dan menenggelamkan beberapa desa beserta asset – asetnya, sekaligus asset – asset masyarakat. Antara lain : Desa Jatirejo, Renokenongo, Siring, Kedungbendo, Mindi, Keboguyang, Kedungcangkring, Pajarakan dan Besuki.

Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, terjadi sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian dan perindustrian, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian Jawa Timur[1]

Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya – Gempol, jalan raya Surabaya – Malang dan Surabaya – Pasuruan –

---

[1] BPLS, "Data Lapindo Porong" (http://www.sidoarjokab.go.co.id 22-7-2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi (Jalur PANTURA Timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya – Malang dan Surabaya – Banyuwangi.

Dari beberapa kerugian yang di alami oleh masyarakat Porong ini akhirnya pihak Lapindo Brantas dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang mengetegorikan kerusakan – kerusakan yang dialami oleh masyarakat porong dengan membagi menjadi tiga ring.

Ring I (Dampak Semburan)

Desa Jatirejo

Ring II (Dampak Luberan)

a. Desa Renokenongo

b. Desa Kedungbendo

c. Desa Siring

d. Desa Keboguyang

Ring III (Dampak Sosial)

a. Desa Mindi

b. Desa Kedungcangkring

c. Desa Besuki

d. Desa Pajarakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ring I (Dampak Semburan) dan Ring II (Dampak Luberan) menuntut :

Ganti rugi penuh yang didasarkan pada nilai jual beli (secara material dan Imaterial)

Secara material Nilai Jual Beli yang diharapkan masyarakat, tanah kering Rp. 1.500.000/ Per Meter, Tanah basah Rp. 1.000.000/Per Meter dan Bangunan Rp. 2.000.000/Per Meter.

Lambatnya ganti rugi disebabkan PT. Lapindo Brantas tidak mau mengganti tanah yang bukti kepemilikannya berupa Petok D atau Letter C. padahal mayoritas tanah di wilayah tersebut bukti kepemilikan masih berupa Petok D atau Letter C.

Dari keterlambatan inilah akhirnya warga melakukan gerakan resistensi supaya hak – haknya terpenuhi. Di mulai dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dengan perwakilan Lapindo Brantas dan Pemerintah Sidoarjo sampai penutupan ruas jalan raya porong dan juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sidoarjo.menurut Wilson seperti dikutip oleh Soenyono dalam bukunya "Teori-teori gerakan sosial" hal 2 mengatakan bahwa gerakan kemasyarakatan adalah tindakan kolektif yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara terorganisir dengan mengunakan cara-cara *institutional.*[2]

Sutjahjono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, bukti kepemilikan tanah berupa apapun harus dibeli oleh Lapindo, asal mendapat pengesahan dari pemerintah.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan – permasalahan yang ingin dicapai atau dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Bagaimana proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

---

[2] Soenyono,*Teori-teori gerakan soaial,*(Surabaya, yayasan kampusium, 2005) h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian berbentuk skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Ingin mengetahui proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan disiplin ilmu sosial serta mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan sosial yang ada dilingkungan masyarakat.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat lebih memperkaya khasanah keilmuan dan kajian tentang ilmu sosial gerakan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tradisi disiplin ilmu sosial

   b. Untuk membantu memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai solusi dari sekian banyak solusi di tengah – tengah persoalan masyarakat.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari bias terhadap masalah dalam penelitian ini, maka definisi konsep menjadi sangat penting untuk diajukan. Dalam penelitian ini konsep yang akan didefinisikan, yaitu:

1. Gerakan kemasyarakatan

   Pengertian gerakan kemasyarakatan adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak ter-lembaga (*non institutional*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat.[3]

   Gerakan kemasyarakatan adalah sebuah bentuk tindakan kolektif baik irasional maupun rasional didalam melakukan perubahan yang inovatif dalam masyarakat itu sendiri, dalam kerangka aksinya gerakan kemasyarakatan harus di dukung dari nilai pluralisasi, visi dan tujuan

---

[3] Robert Mirsel, *Teori pergerakan sosial,* (Yogyakarta, Resist Book, 2004) h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ada unsur budaya yang menjadi pegangan dalam mencari tujuan gerakan.

Gerakan kemasyarakatan dan tingkah laku kolektif mesti dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sebuah orde sosial yang baru. Semua fenomena sosial mesti dimengerti sebagai tindakan-tindakan, yakni pembentukan-pembentukan dunia sosial yang berkelanjutan dan berproses. Tindakan-tindakan ini didasarkan pada komunikasi dan bentuk simbol-simbol. Melalui tindakan-tindakan dan interaksi-interaksi simbolis ini, individu-individu secara tetap menegoisasikan kembali reperesentasi simbolis yang mereka ciptakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang lain.

Ada perbedaan antara gerakan-gerakan dan prilaku kolektif, antara tingkah laku yang terlembaga dan yang tak terlembaga, prilaku kolektif bersifat situasional dan spontan dan kurang terprogram dibawah kebiasaan atau aturan-aturan jika dibandingkan dengan tindakan - tindakan manusia lainnya.

Keyakinan-keyakinan dan tindakan-tindakan (prilaku) yang tidak melembaga *(non institutionalized)* mengandung arti bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku dan diterima umum secara luas dan sah di dalam suatu masyarakat. Dari definisinya gerakan kemasyarakatan adalah sebuah proses perubahan atau (paling kurang, perubahan yang diupayakan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan suatu penelitian dibutuhkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, adapun langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini berisi gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka

Pada bab ini menguraikan tentang kajian kepustakaan (makro) dan (mikro) berupa landasan teoritis yang berkaitan dengan pola keberagaman serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III: Metode penelitian

Pada bab ini berisi pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, wilayah penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV: Penyajian data

Pada bab ini terdiri dari deskripsi umum obyek penelitian yang terdiri atas gambaran umum masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan deskripsi hasil penelitian yang didalamnya membahas tentang hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka.

1. Gerakan Kemasyarakatan.

Menurut Soenyono, "Gerakan kemasyarakatan didefinisikan sebagai perangkat keyakinan dan tindakan kolektif yang tak melembaga (*non institutionalized)* yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat"[1].

Keyakinan-keyakinan dan tindakan-tindakan (prilaku) yang tidak melembaga *(non institutionalized)* mengandung arti bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku dan diterima umum secara luas dan sah di dalam suatu masyarakat. Dari definisinya gerakan kemasyarakatan adalah sebuah proses perubahan atau (paling kurang, perubahan yang diupayakan).

Pertama, obyek analisis dalam studi tentang gerakan kemasyarakatan adalah pertama dan terutama individu. Penelitian perlu memusatkan perhatian pada persoalan mengapa dan bagaimana individu-individu menggabungkan diridalam sebuah gerakan kemasyarakatan dan pada ciri-ciri khas yang membedakan individu-individu yang terlibat dalam sebuah gerakan dari mereka yang tidak terlibat. Kekuatan-kekuatan cultural

---

[1] Soenyono,*Teori-teori gerakan soaial,* (Surabaya, yayasan kampusium, 2005) h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi riil dan dapat diteliti secara empiris tatkala mereka dialih bentukkan kedalam motivasi, predisposisi, dan kecenderungan pribadi. Konsep mengenai kepribadian merupakan cara yang bermanfaat dan sahih guna memperlihatjan konsistensi didalam motivasi, prilaku,keyakinan, dan predisposisi individu. Konsistensi ini terus bertahan lintas waktu dan lintas peran-peran sosial.

Kedua, ideologi, yakni sistem kepercayaan didalam sebuah gerakan kemasyarakatan, bersifat skunder, dan lebih merupakan sebuah elemen yang terdeterminasi ketimbang elemen penentu. Keyakinan-keyakinan para individu dibentuk oleh kepribadian mereka, atau oleh tekanan-tekanan mikro informal didalam lingkungan hidup pribadi para individu studi mengenai keyakinan, dan bukanya ide-ide mengenai sistem kepercayaan sebagai sebuah sistem pemikiran yang abstrak.

Ketiga, fenomena perkumpulan massal *(mass society)* merupakan sebuah konsep yang berguna untuk menghubungkan studi tentang tingkah laku induvidu dengan perubahan-perubahan sosial yang lebih besar. Yang dimaksudkan dengan perkumpulan massal adalah suatu keadaaan di dalam masyarakat di mana para individu disingkirkan dari kelompok-kelompok sosial yang tetap dan membuatnya lebih rentan terhadap aksi-aksi protes atau pengaduan-pengaduan di dalam sebuah gerakan kemasyarakatan. Analisis mesti berfokus pada penelitian bagaimana kondisi-kondisi individu seperti aliensi dan kondisi- kondisi kultural seperti ketakberaturan berhubungan dengan lahirnyasebuah gerakan kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkumpulan massal melahirkan gerakan-gerakan kemasyarakatan, yakni bahwa gerkan-gerakan ini dilihat sebagai jawaban terhadap hilangnya jangkar-jangkar nasional, karena para individu yang terlepas dari komunitasnya yang mapan mencari bentuk-bentuk komitmen bersama yang baru.

Gerakan kemasyarakatan adalah sebuah bentuk tindakan kolektif baik irasional maupun rasional didalam melakukan perubahan yang inovatif dalam masyarakat itu sendiri, dalam kerangka aksinya gerakan kemasyarakatan harus di dukung dari nilai pluralisasi, visi dan tujuan serta ada unsur budaya yang menjadi pegangan dalam mencari tujuan gerakan.

Gerakan kemasyarakatan dan tingkah laku kolektif mesti dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sebuah orde sosial yang baru. Semua fenomena sosial mesti dimengerti sebagai tindakan-tindakan, yakni pembentukan-pembentukan dunia sosial yang berkelanjutan dan berproses. Tindakan-tindakan ini didasarkan pada komunikasi dan bentuk simbol-simbol. Melalui tindakan-tindakan dan interaksi-interaksi simbolis ini, individu-individu secara tetap menegoisasikan kembali reperesentasi simbolis yang mereka ciptakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang lain.

Ada perbedaan antara gerakan-gerakan dan prilaku kolektif, antara tingkah laku yang terlembaga dan yang tak terlembaga, prilaku kolektif bersifat situasional dan spontan dan kurang terprogram dibawah kebiasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau aturan-aturan jika dibandingkan dengan tindakan - tindakan manusia lainnya.

Herbert Blumer, seperti dikutip olah Robert Mirsel, berpendapat bahwa prilaku kolektif bukan sebagai prilaku patalogis dan destruktif.[2]

2. Pola Gerakan Kemasyarakatan.

a. Penekanan pada aspek irasional.

Pada era gerakan kemasyarakatan lebih disebabkan oleh faktor-faktor prilaku sosial yang muncul karena adanya dominasi budaya ataupun paham dalam masyarakat. Pelaku sosial lebih cenderung bertindak secara kolektif didalam mempertahankan budaya maupun paham yang dianutnya ataupun memaksakan budaya atau paham tersebut kepada kelompok lain.

b. Penekanan pada aspek rasional.

Pada era ini gerakan-gerakan kemasyarakatan diwarnai oleh tindakan-tindakan rasional, kelompok - kelompok akademik ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, gerakan - gerakan perjuangan hak sipil, gerakan - gerakan dekolonialisme maupun gerakan-gerakan kemerdekaan ini.

---

[2] Robert Mirsel, *Teori pergerakan sosial,* (Yogyakarta, Resist Book. 2004) h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Gerakan-gerakan dekonstruksi.

Pada era gerakan kemasyarakatan masih bercorak pada pembongkaran paradigma mayarakat, tentang sebuah kemapanan sistem. Gerakan dibidang ekonomi, sosial dan budaya lebih di tekankan pada redefinisi sistem.[3]

B. Kajian Teoritik.

Gerakan kemasyarakatan adalah seperangkat keyakinan dan tindakan kolektif yang tak terlembaga (*Noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat.

1. Pemahaman Gerakan Kemasyarakatan Pada Aspek Rasional.

Gerakan kemasyarakatan paling tepat di mengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan prilaku organisatoris,apapun yang menjadi tujuan atau cita-cita sebuah gerakan kemasyarakatan, strategi organisasi – organisasi yang juga bertingkah sama seperti organisasi – organisasi lainnya.

Aktivitas utama dari organisasi gerakan adalah mobilisasi berbagai macam konstituensi dengan aneka cara guna memperoleh sumber-sumber daya yang di butuhkan. Sumber – sumber daya dalam arti luas dapat

---

[3] *Ibid.* h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakupi waktu dan tenaga para aktivis, dana, senjata, dan dukungan media, dan sebagainya. Bentuk organisasi dan strategi – strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan membuatnya begitu serupa dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembaga *(institutionalized)*, fenomena – fenomena prilaku kolektif (kerumunan, gerombolan pengacau, kelompok panik, rumor, dsb) berhubungan dengan gerakan kemasyarakatan karena mereka merupakan unsur – unsur yang sengaja di ciptakan sebagai bagian dari taktik – taktik yang digunakan dalam gerakan kemasyarakatan. Mereka bukanlah "*primordialisme metter*" dari sebuah gerakan kemasyarakatan (yaitu bahan mentah dari mana gerakan – gerakan kemasyarakatan pada akhirnya terbentuk), melainkan sebuah "*Manufactured Product*" dari sebuah gerakan – gerakan kemasyarakatan (insiden-insiden yang memang di rencanakan oleh sebuah gerakan untuk terjadi sebagai bagian dari strategi dan taktiknya).

Aksi – aksi gerakan kemasyarakatan berlangsung di dalam struktur yang membatasi tetapi tidak sepenuhnya dan tidak secara mekanis pula menentukan bentuk tindakan. Struktur – struktur ini dapat di pelajari sebagai kondisi – kondisi yang eksis secara obyektif. Faktor utama didalam prilaku gerakan *(Movement Behavior)* adalah struktur politik (*Political Oppurtunity Structure*), atau bentuk lembaga – lembaga politik yang bisa saja memaksa strategi – strategi gerakan untuk mengikuti pola tergaris dalam struktur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan – gerakan punya hubungan yang komplek satu sama lain (entah sebagai pesaing dalam mencapai sumber – sumber daya, atau sebagai partner koalisi, dan sebagai gerakan-gerakan tandingan yang saling berlawanan).

Prilaku gerakan (*Movement Behavior*) sebagai perangkat jawaban atau reaksi rasional terhadap lingkungan sosial yang di konseptualisasikan di dalam istilah-istilah struktur sosial. Perbedaan teori mobilisasi sumber daya dengan teori marxis yaitu pada fokus kajiannya, teori mobilisasi sumber daya lebih cenderung menaruh perhatian pada gerakan – gerakan yang berusaha memperluas perjuangan hak-hak warga negara bagi para anggota dan pendukungnya, yakni gerakan – gerakan seperti perjuangan hak – hak sipil (*Civil Right Movement*) dan serikat pekerja perkebunan yang berusaha memperbaiki pasar. Teori marxis lebih condong pada pandangan yang lebih revosioner ketimbang reformis mengenai struktur sosial masyarakat kapitalis.

Paradigma ketegangan struktural *(Structural Strains)* memusatkan perhatian pada interrelasi antara sebuah persoalan didalam masyarakat, yakni ketegangan struktural dengan pembentukan gerakan – gerakan kemasyarakatan guna menjawab persoalan tersebut. Paradigma ketegangan struktural menempatkan ketegangan pada tingkat lebih dari sekedar pengalaman individual. Ketegangan paling kurang sebagiannya merupakan sebuah kondisi yang eksis secara obyektif dan juga suatu keadaan tegang antara aktor-aktor sosial, dalam berbagai bentuknya model-model

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketegangan struktural di rancang untuk menjelaskan bagaimana ketegangan – ketegangan di tanggapi dan di komunikasikan.

T R Gurr menekankan kemarahan dan frustasi sebagai gerak emosional yang disebabkan oleh ketegangan sosial pada level makro dan bertolak pada asumsi ini dia mulai mengembangkan pengukuran – pengukuran kuantitatif bagi hal – hal yang berhubungan dengan alasan lahirnya ketegangan sosial dan pemberontakan dalama masyarakat. Dan juga penting untuk memperhatikan model yang lazim di sebut teori perampasan relatif (*Relative Deprivation Model*). Model ini mengemukakan bahwa ketegangan di tanggapi dalam proses perbandingan yaitu bahwa gerakan – gerakan kemasyarakatan terbentuk jika orang – orang melihat diri mereka relatif terampas (hak-hak dan harta miliknya) di bandingkan kelompok acuan (*Reference Group*).[4]

Yakni yang paling inklusif dan jelas dari semua model ketegangan struktural sebagaiman yang di ungkapkan oleh Neil Smelser yaitu teorinya yang di sebut Teori Nilai –Tambah enam- Tahap (*Six-Stage Value-Added Teori*) mencakup pembahasan tentang ketegangan struktural sebagai faktor penjelas. Selain itu ada pula komponen – komponen lain yang lebih bersifat psikologis, ideologis, prosesual, yang di istilahkannya dengan keyakinan – keyakinan yang tergeneralisasi (*Generalized Beliefs*) serta insiden-insiden pemicu *(precipitating incident)*.

---

[4] TR Gurr, *Why Men Rebel, Princeston, Nj, Princeston University Press.* H. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman Gerakan Dekonstruktif.

Gerakan – gerakan kemasyarakatan yang muncul di tahun 1960-an dan 1970-an, seperti revolusi-revolusi berciri sosialis, gerakan – gerakan dekolonialisasi, gerakan menuntut hak sipil di negara-negara maju, menemukan bahwa keberhasilan mereka pada masa – masa awal memicu lahirnya arus balik. Kebangkitan gerakan – gerakan tandingn memperlihatkan bahwa gerakan – gerakan kemasyarakatan tidak Cuma menjadi pelaku aktif yang berusaha memecahkan masalah – masalah struktural (entah menyangkut kondisi-kondisi obyektif ataupun menyangkut ketegangan struktural). Masalah-masalah struktural pada kenyataannya juga merupakan aktor-aktor dengan agendanya tersendiri.[5]

Aktor – aktor tandingan ini berupaya menghalangi gerakan-gerakan kemasyarakatan yang menyerang privilese, kekuasaan, atau nilai-nilai mereka, dan mereka kerap melakukan hal demikian dengan membentuk gerakan-gerakan tandingan, para elite yang terancam oleh gerakan - gerakan revolusioner memimpin dan mendukung gerakan – gerakan perlawanan, salah satu contoh melalui kebijakan – kebijakan seperti doktrin Reagan.[6]

Teori – teori gerakan kemasyarakatan mesti memahami ide dan visi dibalik gerakan –gerakan tandingan, jadi bukan Cuma organisasi dan

---

[5] Mirsel Robert, *Teori Pergerakan Sosial,* (Yogyakarta, Resist Book. 2004). h. 88-89

[6] *Ibid.* h.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strateginya. Para penganut teori mobilisasi sumber daya telah memberikan perhatian secukupnya pada gerakan – gerakan tandingan namun mungkin memperlakukannya dalam cara yang terlalu reduksionistis, dimana mereka melihat gerakan – gerakan tandingan entah sebagai hambatan struktural bagi sebuah gerakan kemasyarakatan untuk diatasi atau sebagai aktor – aktor organisatoris yang dapat dianalisa dengan cara yang sama seperti organisasi gerakan lainnya. Para teoritisi mobilisasi sumber daya telah memberikan perhatian yang relativ lebih kecil terhadap ideologi gerakan – gerakan tandingan atau terhadap makna historisnya yang lebih luas.

Teori ketegangan sosial telah membalikan pelakon – pelakon manusia ke dalam kekuatan – kekuatan impersonal *(Structural Strains)*. Teori mobilisasi sumber daya sebaliknya melihat ketegangan ini sebagai pelakon – pelakon manusia namun memberikan terlalu kecil terhadap ide – ide mereka, mereka mengkonseptualisasi sebagai organisasi – organisasi yang menggunakan cara – cara rasional *(Means – Rational Organizations)*, seperti badan usaha yang berkecimpung dalam upaya memperoleh keuntungan yang maksimal jangka pendek, ketika dalam kenyataannya merupakan kekuatan – kekuatan cultural, yang ternodai dalam menciptakan dan menstransformasikan gagasan – gagasan yang hidup di tengah masyarakat. Konflik – konflik kultural ini lebih merupakan proses – proses historis yang panjang ketimbang keberhasilan – keberhasilan dan kegagalan – kegagalan jangka pendek sebagaimana yang di analisa oleh para teoritisi sumber daya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya jurang – jurang pemisah daam pemahaman yang di tinggalkan akibat kurangnya pemahaman paradigma mobilisasi sumber daya terhadap ideologi dapat terisi oleh adanya upaya membuat analisis tentang diskursi-diskursi budaya, yang merupakan sebuah paradigma baru dalam ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial, sekaligus merupakan arus balik kepada dua tradisi sosiologis, yakni perhatian teoritis kepada perubahan – perubahan jangka panjang sebuah sejarah yang menekankan pemahaman cara – cara manusia berinteraksi satu sama lain dalam proses mendefinisikan situasi-situasi secara berkelanjutan. Semua proses sosial mencakupi tindakan manusia kadang-kadang dalam bentuk pertunjukan dan kadang – kadang dalam pemaknaan situasi, menurut Jo Freman bahwa para teoritisi gerakan – gerakan kemasyarakatan mesti mencakupkan gagasan – gagasan, sistem – sistem kepercayaan, dan penafsiran sosial atas makna didalam paradigma – paradigma tersebut.[7]

Isu-isu dan masalah – masalah yang muncul sekitar teori – teori gerakan kemasyarakatan berkembang luas di akhir tahun 1970-an dan 1980-an. Tidak hanya bahwa gerakan – gerakan di tahun 1960-an dan 1970-an menghadapi masalah-masalah dalam memperkuat keberhasilan-keberhasilan awal, tetapi juga struktur – struktur ekonomi dan sosial tengah berubah dengan tipe – tipe baru gerakan – gerakan kemasyarakatan juga sedang muncul.

---

[7] Freeman Jo, *The Tyranny Of Strukturelessness*, dalam Anne Koedt, Ellen Levine, Anita Rapone, Radical Femininsm, New York

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah pergeseran dalam produksi ekonomi dan struktur kelas yang mengiringinya dalam ekonomi maju. Fenomena "De – Industrialisasi", "Pasca-Industrialisasi", "Pasca – Ford-Isme", "Kapitalisme Akhir", "Modernitas Tingkat Tinggi", "Kapitalisme Maju", "Ekonomi Pelayanan atau ekonomi Transformasi" mempunyai implikasi-implikasi tertentu bagi gerakan – gerakan kemasyarakatan dan teori-teorinya. Apapun istilah yang di pakai, nampaknya kenyataan yang di garis bawahi adalah sebuah transformasi masal yang menghasilkan industri-industri di dalam ekonomi pasar maju. Produksi industri tidak berakhir, penggunaan mesin – mesin menerobos kawasan – kawasan baru, seperti pemrosesan informasi, namun, produksi ini menjadi otomatis, di organisasi kembali, dan bergesr ke lokasi-lokasi baru di wilayah pinggiran dan semi pinggiran di negara-negara industri baru.

Dengan adanya perubahan-perubahan ekonomis seperti ini, muncul pula kemerosotan dalam bidang kebudayaan, hidup persekutuan, dan organisasi-organisasi kelas buruh industri di Eropa dan Amerika Tengah. Di Amerika Serikat, koalisi para buruh yang bernama *New Deal* hancur, demikian juga dengan koalisi liberal, warga kulit hitam, kelas buruh kulit putih, dan kaum kulit putih kawasan selatan Amerika Serikat juga berlahan-lahan hancur. Merosotnya koalisi *New Deal* di Amerika Serikat dan melemahnya peran budaya dan politik kaum buruh tradisional di Eropa di iringi pula oleh perubahan-perubahan didalam identitas kolektif serta tipe-tipe baru aktivisme mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pergeseran-pergeseran yang terjadi didalam bidang ekonomi, budaya, dan politik ini menciptakan pemandangan baru bagi gerakan-gerakan kemasyarakatan dan dengan demikian juga untuk analisis gerakan kemasyarakatan. Pergeseran-pergeran ini terkait pula dengan merosotnya politik yang berbasis sosial. Kemerosotan ini pertama kali diamati didalam gerakan-gerakan kemasyarakatan di Eropa. Ungkapan "gerakan-gerakan kemasyarakatan baru" mulai dipakai untuk sejumlah gerakan yang terorganisir secara sangat longgar, dan terkait dengan mobilisasi-mobilisasi yang mendukung perdamaian. Istilah ini juga dipakai untuk mendukung otonomi perempuan dan kaum homo seksual serta melawan polusi lingkungan hidup.

Nilai-nilai yang dimunculkan oleh apa yang disebut gerakan-gerakan kemsyarakatan baru bersifat anti thesis terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai kapitalis. Para pelaku gerakan kemasyarakatan berusaha mencari bentuk-bentuk kebudayaan yang baru dan menuntut perwakilan (*Representasi*) baru bagi kelompok-kelompok sosial pinggiran sekaligus perwakilan bagi kelompok itu sendiri. Arena perjuangan tidak lagi berlangsung ditempat kerja dan proses produksi melainkan didalam komunitas-komunitas, perwakilan-perwakilan budaya dan estetik, dan didalam praktek-praktek yang mengagung-agungkan tubuh dan seksualitas. Kebutuhan-kebutuhan non-material diberi tempat utama.

Gerakan-gerakan ini melibatkan diri didalam tindakan-tindakan berskala kecil dan anti hierarki sekaligus membuat uji coba dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi langsung dikalangan para pemilih utama yang mudah bergeser dan berada dalam jaringan hubungan yang longgar.[8]

Gerakan-gerakan kemasyarakatan mesti dimengerti tidak hanya dalam kaitan dengan prilaku organisatoris tetapi juga dalam kaitan dengan sistem kepercayaan, ideologi, dan wacana-wacan a yang berkembang. Dalam gerakan harus ada koherensi sistem kepercayaan sekaligus adanya penekanan dalam budaya gerakan yang kurang koheren, dan lebih fregmentaris. Semua unsur ini membentuk elemen-elemen kunci dari gerakan-gerakan kemasyarakatan yang muncul dan mesti menjadi obyek teori.

Teori-teori gerakan mesti menaruh perhatian pada pembentukan dan diseminasi sistem-sistem kepercayaan dalam jarak jangkau yang lebih luas. Gerakan-gerakan kemasyarakatan mesti mencakupi pula perhatian terhadap ideologi-ideologi serta strategi-strategi dan mobilisasi-mobilisasi organisasi gerakan kemasyarakatan.

Proses-proses gerakan mencakup kerangka waktu yang lebih panjang daripada yang disiapkan oleh banyak teoritis mobilisasi sumber daya untuk meneliti fenomena gerakan kemasyarakatan didalam riset-riset yang mereka lakukan, dinamika gerakan kemasyarakatan bisa saja berlangsung berdekade-dekade dan malah beratus-ratus tahun dalam

---

[8] Mirsel Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, (Yogyakarta, Resist Book. 2004). H. 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penampakan dirinya diatas pentas sejarah. Perhatian perlu juga diberikan kepada akibat-akibat yang terencana (*Unintended)* dan tak terantisipasi (*Unanticipated*) dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh sebuah gerakan.

Penyatuan kerangka (*Frame aligment*) dan perubahan kerangka (*Frame transformation*) merupakan dua konsep yang mengacu pada sejauhmana sistem-sistem kepercayaan sebuah gerakan kemasyarakatan yang baru cocok atau mala menantang sistem-sistem kepercayaan yang sudah ada.[9]

Penggunaan istilah mentalitas menunjuk pada keberhasilan mempertahankan bentuk-bentuk kultural dalam jangka waktu yang panjang. Mentalitas adalah kebiasaan-kebiasaan berfikir, yang ditularkan dari generasi ke generasi melalui semua praktek kehidupan sehari-hari atau dengan istilah (*Cultural framework*) "kerangka kerja budaya", mereka membentuk apa yang diyakini oleh anggota-anggota komunitas budaya sebagai "pikiran sehat" (*Common sense).*

Gerakan kemasyarakatan kerap kali hanya merupakan puncak yang terorganisisr dan kelihatan dari sebuah gunung es alienasi, disafiliasi dan oposisi seperti yang terungkap dalam interksi, organisasi, kebiasaan, dan praktek-praktek serta bentuk-bentuk kultural lainnya.

---

[9] Snow, David, dan Robert Benfort *"Ideology, Frame Resonance and Participan Mobilization"* dalam Mirsel Robert, Teori Pergerakan Sosial, (Yogyakarta, Resist Book. 2004), h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan identitas meruakan sebuah komponen penting dari setiap gerakan kemasyarakatan. Proses ini samasekali bukan merupakan sesuatu yang diberikan dari sebuah struktur sosial. Basis dukungan bagi mobilisasi sebuah gerakan tidak tersedia secara alamiah dan otomatis, basis itu dari dirinya merupakan sebuah konstruksi sosial *(social construct)*.[10]

Basis dukungan bisa saja mengarahkan sebuah gerakan menjadi agen bagi kelompok-kelompok yang merasakan adanya keteganan struktural *(Structural strain)*, namun gerakan juga menciptakan basis dukungan bagi dirinya sendiri. Dalam menganalisis gerakan-gerakan kemasyarakatan perlu pula menaruh perhatian pada apa yang di sebut sudut pandang dekontruksionis tentang bagaimana indentitas, subyek, dan rasa keagenan *(Sense of agency)* terkonstruksi secara sosial. Pembentukan seseorang (*Subyek*) dengan identitasnya yang tertentu misalnya, dengan identitas etnisnya dan bukan identitas sosial kelas gender. Sementara para teoritisi psikologi sosial dari periode pertama melihat identitas individu (*dan motivasi – motivasi yang terkait dengannya*) sebagai sebab timbulnya gerakan kemasyarakatan, para teoritisi periode ketiga melihat gerakan kemasyarakatan sebagai penyebab identitas. Menurut teori pada periode ketiga ini, wacana-wacana gerakan membentuk para individu sebagai subyek pelaku dan mendefinisikan serta membangun sebuah indentitas kolektif bagi mereka. Prespektif

---

[10] Goldstone Jack, 1991 *"Ideology, Cultural Frameworks, and the process of Revolution "The and Society*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekonstruksionis ini akhirnya mengakui sejumlah substansi dari apa yang di namakan oleh Herbert Blumer dengan paradigma Interaksionis dari gerakan kemasyarakatan, sebuah paradigma yang turut pula memperhitungkan interaksi dan komunikasi dalam pembentukan sebuah gerakan. (namun ada sejumlah perbedaan besar antara teori interaksionis dan teori dekonstruksionis): keduanya dapat dilihat sebagai dua pendekatan yang memecahkan persoalan-persoalan serupa namun tidak identik baik dalam konsep maupun asumsi-asumsi dasarnya.

Gerakan kemasyarakatan perlu memberikan perhatian secukupnya kepada perubahan-perubahan yang tengah terjadi saat ini didalam ekonomi global dan struktur politik. Meskipun para pengamat menggunakan aneka istilah seperti yang lebih modern kapitalis maju, postmodern, kapitalis baru, post-industrialisasi dan sebagainya yang kebanyakan tidak memuaskan, mereka biasanya menunjuk kepada sebuah rangkaian perkembangan baru yang saling berhubungan, yakni post-fordisme dalam bidang ekonomi, erosi atau rekomposisi negara kebangsaan dengan proses-proses sub- dan supernasionalnya yang semakin menjadi penting, tatkala negara kebangsaan kehilangan sebagaian control mereka atas ekonomi nasional, media antar negara telah mempercepat difusi gagasan-gagasan dari sebuah gerakan kemasyarakatan melampaui batas antar negara, proses-proses global semacam ini mestinya menjadi bagaian yang lebih integral dari teori gerakan kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep-konsep seperti organisasi gerakan kemsyarakatan, mobilisasi sumber daya, dan struktur peluang politik merupakan nilai yang berkelanjutan. Teori-teori pada periode pertama yang lebih berfokus pada individu juga dapat memberikan sumbangan yang berarti, bangkitnya kembali sudut pandang psikologi sosial sedang terjadi dan kini lebih terpusat pada pembentukan identitas kolektif dan bukannya pada kecenderungan-kecenderungan individual. Munculnya minat terhadap sistem kepercayaaan (belief sistem) menganjurkan bahwa teoritis gerakan kemasyarakatan sedang kembali kepada sebagian tema-tema pada periode pertama, meskipun tidak lagi terpusat pada tingkah laku perorangan dan aspek-aspek psikologi dari keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam sebuah gerakan kemasyarakatan.

Mengintregasikan sub-bidang sosiologi gerakan kemasyarakatan dengan sosiologi makro, sebuah tradisi pemikiran sosial yang beranjak kembali kepada Marx dan Weber. Karya Goldstone, Riesebrodt, Skocpol, Wallerstein, dan tarrow di antaranya mengintegrasikan teori gerakan kemasyarakatan kontemporer dengan perhatian-perhatian pokok yang telah berlangsung lama dalam bidang sosiologi, yakni mengenai analisis jangaka panjang dan skala besar mengenai sebab dan akibatyang di timbulkan oleh gerakan-gerakan kemasyarakatan. Jadi, bukan berarti gerakan dekonstruktif menolak karya-karya teori gerakan kemasyarakatan sebelumnya melainkan sebagai perluasan, sebuah sintese, dan sebuah penyisipan teori-teori berskala lebih kecil ke dalam analisis historis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Banyaknya posisi "atau-atau" sebagaimana terungkap dalam teori gerakan kemasyarkatan terdahulu di tolak, dan bidang ini sedang pula terbuka bagi pengintegrasian berbagai sudut pandang yang sebelumnya di yakini atau cocok satu sama lain. Pendekatan mikro dan makro, psikologi sosial dan studi-studi mengenai berbagai organisasi, serta analisis wacana dan teori-teori struktural semuanya mendapatkan ruang di dalam sintesa yang tengah muncul saat ini

Semua tema yang sedang muncul ini mencakup perhatian yang lebih dekat dengan sejarah dan ideologi, serta pengakuan terhadap perubahan yang terencana sebagai sebuah proses yang lebih perlahan dan lebih konfliktual daripada yang di pikirkan. Gerakan – gerakan kemasyarakatan tidak hanya sebagai upaya – upaya pragmatis untuk memecahkan ketegangan – ketegangan struktural melalui strategi- strategi organisatoris tetapi juga menjadi bagian dari perubahan – perubahan ideologi jangka panjang.

3. Kesinambungan Periode Gerakan Kemasyarakatan.

Berbagai pergeseran-pergeseran terjadi dalam gerakan kemasyarakatan akan tetapi memiliki kesinambungan antar periode;pertama, adanya konsensus kelanjutan mengenai batasan tentang gerakan kemasyarakatan, secara konsisten gerakan kemasyarakatan di definisikan sebagai proses perubahan, sebagai tindakan yang terencana (baik rasional maupun irasional), dan sebagai tantangan non instutional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap lembaga-lembaga resmi. Kedua, setiap gerakan kemasyarakatan bermain bersama dengan ketegangan antar keagenan (*Agency*) dan struktur. Sebagian dari gerakan-gerakan itu selalu bersifat sukarela, dilihat sebagai ekspresi keagenan manusia. Namun pembentukan dan hasilnya juga di tentukan sebagai akibat dari struktur-struktur dan proses – proses yang di bangun untuk membatasi apa yang mungkin terjadi. Ketegangan antara keagenan dan batas-batas menggaris bawahi setiap ilmu tentang manusia, namun di rasakan paling kuat dan eksplisit dalam studi-studi mengenai gerakan-gerakan kemasyarakatan. Ketiga, bidang sosiologi kemasyarakatan selalu di tandai oleh adanya kebutuhan untuk memperluas melampaui batas-batas sosiologi. Di bandingkan dengan sub bidang sosiologi lainnya, teori-teori gerakan kemasyarakatan kurang terhimpit oleh batas-batas konvensional oleh bidang sosiologi. Bidang ini selalu tumpang tindih dengan psikologi, ilmu politik, sejarah, jurnalisme, dan ilmu-ilmu humaniora. Para teoritisi gerakan kemasyarakatan telah lama terlibat dalam dialog yang produktif dengan para teoritisi dan aktivis di luar arus utama akademik, khususnya dengan kelompok-kelompok penganut teori marxis dan kemudian dengan kelompok-kelompok feminis. Dalam hal ini bidang sosiologi gerakan kemasyarakatan memperlihatkan cara bagaimana terciptanya sebuah integrasi baru antara ilmu-ilmu sosial dengan studi-studi kebudayaan, sebuah integrasi yang mengalami percepatan pada periode ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur kesinambungan yang kedua adalah komitmen di antara para teoritisi sosiologi gerakan kemasyarakatan terhadap sebuah masyarakat yang terbuka. Kebanyakan para teoritisi mengikatkan diri dengan demokrasi liberal dan pluralisme atau dengan sosisalisme demokratik. Sepanjang waktu enam puluh tahun terakhir ini, para ahli gerakan kemasyarakatan telah mengevaluasi berbagai gerakan dalam kaitannya dengan nilai-nilai. Mereka mengakui bahwa gerakan-gerakan tertentu mungkin menciptakan sebuah tantangan terhadap nilai-nilai ini, karena tatanan baru sebagai sasaran atau tujuan perjuangan sebuah gerakan sering merupakan sebuah masyarakat tertutup dan sempurna.

Gerakan – gerakan kemasyarakatan kerap mengartikulasikan sebuah visi menyeluruh tentang masyarakat yang cenderung menyingkirkan keterbukaan dan kemungkinan untuk perubahan lebih jauh. Jadi, para ahli sudah lama bersikap kritis terhadap fenomena-fenomena yang mereka pelajari, khususnya pada periode pertama dan ketiga. Pada waktu bersamaan, mereka mengakui bahwa jumlah keseluruhan gerakan-gerakan kemasyarakatan yang juga di sebut sektor gerakan (*Movement Sector*) dari sebuah masyarakat, merupakan sebuah mekanisme untuk memperkuat nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan keterbukaan. Eksistensi gerakan-gerakan kemasyarakatan di dalam sebuah masyarakat memungkinkan adanya koreksi terhadap ketidakadilan, perbaikan terhadap kesalahan, dan upaya-upaya mencapai kemungkinan – kemungkinan baru. Memperkuat nilai-nilai pluralisme, demokrasi dan keterbukaan. Eksistensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan-gerakan kemasyarakatan di dalam sebuah masyarakat memungkinkan adanya koreksi terhadap ketidakadilan, perbaikan terhadap kesalahan, dan upaya-upaya untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan baru.

Jadi tangguhnya sektor gerakan merupakan syarat mutlak bagi masyarkat yang demokratis. Terlepas dari ciri tertutup atau dogmatisnya gerakan tersebut.meskipun salah satu gerakan bisa saja menuntut ketertutupan, kesempurnaan, totalisasi, sektor-sektor gerakan kemasyarakatan berfungsi untuk memajukan pluralisme gerakan – gerakan kemasyarakatan beraksi dengan cara gerakana-gerakan yang menentang ketertutupan, dan dengan demikian masyarakat tetap tinggal terbuka, tidak kaku, bercermin diri dan mengoreksi diri. Visi ganda ini (*yakni bahwa gerakan kemasyarakatan dalam sisi terbuka atau tertutup*) mempengaruhi ketegangan dinamis di dalam sebuah masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa peneliti yang meneliti tentang gerakan resistensi antara lain: Dapit Yusra Kusuma, Bentuk Resistensi dan Resolusi Perlawanan, Prodi Sosiologi Jember, 2005.

Peneliti ini mengupas, pertama: gerakan ini merupakan reaksi deprensif terhadap perubahan yang di anggap mengancam kelangsungan hidup mereka. Kedua; terdapat sebuah motor gerakan atau pemimpin gerakan yang hubungannya bersifat patronasi pada Petani lainnya. Jadi gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlawanan petani pada prespektif ini di asumsikan sebagai sebuah reaksi yang di dasarkan pada moralitas tradisional yang berorientasi pada pandangan terhadap keamanan subsitensi mereka.

Akhirnya dalam penelitian yang relevan, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada penelitian terdahulu menjelaskan: (1) Sebab terjadinya gerakan petani, (2) Menjelaskan tentang kepemimpinan dan struktur gerakan. Adapun dalam penelitian penulis mengkaji tentang gerakan kemasyarakatan dan bentuk gerakan kemasyarakatan, adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu mengangkat persoalan gerakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif analisis kualitatif. Adapun alasan peneliti memilih metode deskriptif analisis adalah:

1) Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis tentang gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur lapindo di kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo.

b) Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti merasa perlu untuk terjun langsung kelapangan dan memposisikan dirinya sebagai instrument penelitian, sebagai salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif.

Menurut *Lexy J Moleong,* "bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara *Holistic* (utuh)".[1]

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terutama desa yang kena dampak semburan lumpur panas Lapindo. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis sedikit banyak sudah mengetahui atau paham dengan lokasi yang akan diteliti.

[1] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002. Hal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. peneliti juga menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

1. Data Primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan sebagai hasil wawancara yang telah dilakukan, baik dengan cara bertemu langsung, via telepon atau observasi lapangan. Wawancara tersebut dari sebagian informan yakni masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kepala desa.
2. Data Skunder. Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer. Data sekunder berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap dari data primer. Data skunder dapat diperoleh juga dari data internal yakni data yang diperoleh dari pendapat para anggota masyarakat atau informan, dan bisa diperoleh dari data eksternal, yakni dari sumber lain seperti buku, artikel, Koran, majalah, data monografi dan lain sebagainya. Ketersediaan sumber data salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Betapapun menariknya sebuah masalah penelitian apabila sumber data tidak tersedia dan sulit dijangkau, niscaya masalah tersebut tidak dapat diteliti. Penelitian kualitatif ini lebih bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial , karena itu bersifat masyarakat sebagai objek Dalam hubungan ini, peneliti tidak hanya *Studying People*. Di samping menelaah manusia, peneliti peneliti juga belajar dari manusi yang ditelitinya.[2]

Konsekuensi yang terjadi dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian

[2] Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang, 1990. Hal 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif, ketepatan dan memilih jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang di peroleh.[3]

Guna mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikanya menjadi empat yaitu:

1. Narasumber (Informan)

   Penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau juga disebut subjek yang di teliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

   Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dan narasumber mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu peneliti harus pandaipandai mengenali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban dan kerja sama dengan subjek yang diteliti, disamping tetap kritis dan analitis. Karena itu peneliti harus mengenal secara lebih mendalam informanya, dan meilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, informan bisa sebagai pelaku, pengamat, pengelola dan perencana, atau sekedar penerima atau orang yang mengtahui informasi subjek lain yang diperlukan peneliti. Adapun para informan yang berhasil diwawancarai penenilti adalah:

   a. H. Moch. Pain Ghazali (Kepala Desa Siring)

[3] Imam Suprayogo Dkk, *Metodologi Penel;Itian Social Agama*, Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2001. Hal 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Subakhri (Kepala Desa Reno Kenongo)

c. Mislan (Kepala Desa Mindi)

d. H. Samad (Kepala Desa Jatirejo)

e. Susanto (Warga Jatirejo)

f. Himamuddin (Warga Siring)

g. M. Faizul Faizun (Koordinator Kelompok Kerja Nahdliyin)

h. A. Novik (SekJend Forum Pemuda Peduli Lumpur Sidoarjo)

i. M. Zakariyah (Kordinator Gerakan Korban Lumpur)

j. H. Nasikhuddin (Ketua MWCNU Porong)

k. M. Asep (Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' Porong)

l. Atoirrochim (Kordinator Masyarakat Peduli Rakyat Sidoarjo)

2. Peristiwa atau Aktivitas

Data atau inforamasi dapat diperoleh malalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktifitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena kesaksian sendiri secara langsung. Dengan mengamati secara langsung peristiwa aktifitas, peneliti dapat melakukan kross cek terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang di teliti.

3. Tempat atau Lokasi

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas dilakukan bisa digali lewat sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkunganya. Dari memahami lokasi atau lingkunganya, peneliti bisa secara cermat mencoba mengkaji secara kritis guna menghasilkan beragam kemungkinan yang nantinya diperoleh dari penelitian ini. Adapun tempat atau lokasi yang di jadikan observasi untuk penelitian ini adalah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

4. Dokumentasi Arsip

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia juga bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-surat, rekaman, gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi, bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumentasi atau arsip.

D. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai alat penelitian. Jadi dalam menyusun rencana suatu penelitian, peneliti harus benar-benar memahami bagaimana langkah-langkah yang harus di tempuh dalam suatu penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi.

1. Tahap Pra Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap pra lapangan ini antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Untuk menyusun rancangan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mempelajari beberapa literatur tentang masyarakat terlemah dalam stratifikasi sosial, serta memulai memilih lokasi penelitian. Baru kemudian setelah itu peneliti menentukan beberapa pekerjaan, di antaranya menentukan latar belakang penelitian, menentukan sasaran dan fokus penelitian, kajian kepustakaan, membuat rancangan data-data yang diperlukan dan teknik memperolehnya. Menentukan bagaimana data dianalisis serta merancang pengecekan kebenaran data.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Yang menjadi lapangan penelitian disini adalah masyarakat korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

c. Mengurus Perizinan

Disini yang dilakukan pertama kali peneliti adalah mencari tahu siapa saja yang berkuasa dan berwewenang memberi izin bagi pelaksanaan penelitian. Kemudian peneliti melakukan langkah-langkah persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut. Adapun langkah-langkah mengurus perizinan yang peneliti lakukakan adalah pertama, meminta surat perizinan penelitian dari Program studi sosiologi yang selanjutnya di tanda tangani oleh Dekan Fakultas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya selanjutnya diserahkan kepala kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (BakesBang Linmas) Kabupaten Sidoarjo.

d. Memilih dan Memanfaatkan Informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang stuasi dan kondisi dan latar belakang penelitian, atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Maka dalam hal ini yang menjadi informan adalah masayarakat korban lumpur lapindo yang berada di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Adapun para informan yaitu:

a. H. Moch. Pain Ghazali (Kepala Desa Siring)
b. Subakhri (Kepala Desa Reno Kenongo)
c. Mislan (Kepala Desa Mindi)
d. H. Samad (Kepala Desa Jatirejo)
e. Susanto (Warga Jatirejo)
f. Himamuddin (Warga Siring)
g. M. Faizul Faizun (Koordinator Kelompok Kerja Nahdliyin)
h. A. Novik (SekJend Forum Pemuda Peduli Lumpur Sidoarjo)
i. M. Zakariyah (Kordinator Gerakan Korban Lumpur)
j. H. Nasikhuddin (Ketua MWCNU Porong)
k. M. Asep (Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' Porong)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Atoirrochim (Kordinator Masyarakat Peduli Rakyat Sidoarjo)

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelilitian

Untuk perlengkapan penelitian ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara, referensi buku dan lain sebagainya.

2. Tahap Pekerja Lapangan atau Kegiatan Lapangan

Pada tahap ini peneliti lebih banyak berkutat pada pencarian dan pengumpulan data yang ada dilapangan melalui berbagai teknik yang di gunakan. Pada tahap ini peneliti akan berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan memilih dan memanfaatkan informasi serta mendokumentasikan berbagai kegiatan penelitian di lapangan.

3. Tahap Analisis Data

Setelah data dari semua lapangan terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang ada untuk kemudian diambil data yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode Observasi, Interview dan Dokumentasi. Dalam hal ini jelasnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Menurut M. Nasir "Observasi adalah serangkaian pengamatan dan pencatatan gejala yang menjadi objek penelitian secara sistematis, sesuai dengan tujuan penelitian".[4]

Kegunaan teknik ini menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong adalah "karena pada teknik ini didasarkan atas pengamatan langsung yang di mungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkenaan dengan pengetahuan yang diperoleh dan, peneliti dapat mengecek benar tidaknya informasi yang di berikan. Peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks, dan juga dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainya yang tidak dimungkinkan dilakukakan oleh si peneliti".[5]

Melihat manfaatnya dalam penggunaan teknik observasi ini, maka dalam penelitian ini mengggunakan teknik observasi (pengamatan) terlibat.

Ada empat macam teknik pengamatan terlihat, yakni pengamatan terlihat secara positif, pengamatan terlihat setengah-setengah, teknik pengamatan secara aktif dan teknik pengamatan secara penuh lengakap. Dari keempat teknik pengamatan (observasi) terlibat tersebut diatas, peneliti menggunakan teknik pengamatan terlihat secara aktif dalam artian terlihat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pertama kali observasi dilakukan secara menyeluruh terhadap fenomena yang akan diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan fenomena lapangan yang akan diteliti guna memperoleh fokus penelitian.

---

[4] M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999. Hal 211.
[5] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002. Hal. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau (*interview*) adalah proses Tanya jawab dalam penelitian secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka serta mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.

Dalam teknik wawancara ini kondisi proses berlangsungnya adalah bebas dan tidak terpengaruuh oleh adanya pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat berkembang secara leluasa seperti terjadinya arus komunikasi *face to face*. Hasil interview ini di usahakan mampun menunjang data yang terkumpul lewat observasi.[6]

Wawancara harus dilakkukan secara efektif, artinya dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Bahasanya harus jelas, begitu juga dengan suasananya harus tetap rileks agar data yang diperoleh adalah data objektif dan dapat dipercaya. Ada dua cara dimana peneliti dapat mengecek kembali hasil wawancara yang dilakukan, yakni dengan mengadakan catatan langsung saat wawancara dengan menggunakan tape recorder.

Dalam penelitian ini peneliti memilih cara pertama yakni dengan menggunakan catatan langsung. Sebab pencatatan langsung dianggap efektif dan lebih tepat dan terkesan tidak menolak. Tetapi kadang-kadang juga menggunakan tape recorder.

Teknik wawancara di gunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang:

---

[6] Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 1997. Hal 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bagaimana kondisi masyarakat korban lumpur Lapindo kecamatan Porong di penampungan pasca ditimpa luapan lumpur Lapindo?

b) Apakah yang dilakukan MWCNU dalam menyikapi persoalan yang dialami oleh masyarakat Porong terutama warga Nahdliyin?

c) Bagaimana cara para kepala desa terdampak untuk menampung aspirasi masyarakatnya?

d) Dalam melakukan pendampingan kepada para korban lumpur lapindo cara apa saja yang dilakukan oleh LSM tuk menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat mau melakukan gerakan untuk menuntut haknya?

e) Apakah yang menyebabkan masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melakukan gerakan menuntut ganti rugi terhadap PT. Lapindo Brantas?.

f) Dalam implementasinya PT. Lapindo Brantas terkesan kurang memperhatikan masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, tetapi masyarakat tetap semangat dalam menyuarakan aksinya, apakah yang menjadikan masyarakat Porong sampai hari ini masih bertahan?

Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat, kiai, sesepuh warga, tokoh pemuda, dan beberapa warga yang menjadi korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

3. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.[7]

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti yang berkenaan dengan data-data yan berhubungan dengan lokasi penelitian, seperti data tentang monografi, dan data-data yang lain. Demikian data-data yang berhubungan dengan aktifitas interaksi kehiduapan social masyarakat, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Pada metode ini peneliti akan meminta beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti dari kelurahan, kecamatan serta instansi terkait dengan fokus dari objek kajian peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitia ini terdapat dua cara analisis, pertama, analisis guna mempertajam keabsahan data dan kedua melalui *interpretasi* (tafsiran) data secara keseluruhan.

Pada analisis model pertama dilakukan penyusunan data, yakni penyusunan paparan (transkip) hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, masyarakat, maupun informan lainya, hasil observasi dan dokumen-dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

---

[7] Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarat: PT Asdi Mahasatya, 2002. hal 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, data tidak dianggap *eror reality* yang dipermasalakan oleh teori yang ada sebelumnya, tetapi dianggap sebagai *another reality*. Dalam hal ini peneliti mencatat data yang selama ini dimiliki.

Proses analisis data dimulai dengan *editing*, yaitu peneliti menelaah seluruh data ang dihasilkan dari beberapa sumber melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi untuk kemudian di pilih sesuai kerangkah penelitian yang di buat.

Langkah selanjutnya adalah pengorganisasian data, yaitu proses pemaduan data yang bearasal dari lapangan dengan mengkonfirmasi data dari beberapa sumber yang lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah *interpretasi* atau penafsiran terhadap data yang ditemukan dengan melakukan pendekatan dari berbagai teori dan disiplin keilmuan yang ada.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Selama proses penelitian, kesalahan dapat timbul baik dari peneliti maupun dari objek penelitian. Untuk menguraikan dan meniadakan kesalahan data tersebut maka penulis mengadakan pengecekan kembali hasil data yang sudah sipeneliti peroleh sebelum diproses dan disajikan dalam bentuk laporan data dengan harapan agar laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan.

Maka dari itu agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan pemeriksaan keabsahan secara teliti dan cermat, melalui:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpenjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek.

Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun kedalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Distorsi tersebut bisa tidak sengaja atau bisa juga sengaja misalnya informan atau responden, berdusta atau menipu atau pura-pura. Hal ini bisa diantisipasi dengan jalan keikutsertaan.[8]

Mengingat perpanjangan keikutsertaan sangat penting untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, maka peneliti melibatkan diri dalam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.[9]

---

[8] Lexy J. Moleong,. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002. Hal 175-176.
[9] Imam Suprayogo, *Metodologi Penel;Itian Social Agama*, Bandug: PT Remaja Rosdakarya, Hal 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu ketekunan pengamatan merupakan suatu bagian penting dalam pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti melakukan hal tersebut secara teliti, rinci dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data ysng memanfaatkan suatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun maksud dari triangulasi itu adalah peneliti melakukan perbandingan dan mengecek hasil ulang suatu data yang dihasilkan dari wawancara. Dengan demikian data yang diperoleh setelah melakukan triangulasi akan menjadi daya yang objektif.

Hal tersebut penting untu dilakukan karena boleh jadi komentar antara satu dengan lainya tidak sama dengan menilai objek, dengan kata lain pemikiran dan pendapat mereka tentang objek subjektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Letak Dan Kondisi Geografis

Kecamatan Porong terletak ± 4 meter dari permukaan laut dan antara 112,5° - 112,9° lintang selatan, dengan jarak ± 6 Km dari Ibukota Kabupaten Sidoarjo.

Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Tanggulangin

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Jabon

Sebelah Barat : Kecamatan Krembung

Keadaaan Iklim di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi dua musim (1) musim hujan 4 bulan dan (2) musim kemarau 8 bulan.

Prasarana peribadatan masjid yang ada di Kecamatan Porong sebanyak 22 Unit, Gereja 1 Unit, sedangkan Mushollah berjumlah 110 Unit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Wilayah Kecamatan Porong

Nama	Keterangan
Tanah Sawah	1014,0 Ha
Tanah Tegal	147,8 Ha
Tanah Pekarangan	1153,1 Ha
Tanah Tambak	496 Ha
Jumlah	414.100.000 Ha

Sumber: Monografi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Th 2009.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Luas tanah sawah 1014,0 Ha, tanah tegal 147,8 Ha, tanah pekarangan 1153,1 Ha, dan tanah tambak 496 Ha.

2. . Prasarana Dan Sarana

Potensi sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Porong ini banyak sekali diantaranya yaitu:

Tabel 2

Prsarana Dan Sarana Transportasi

Nama	Keterangan
Panjang jalan aspal	80 km
Panjangan jalan macadam	48 km
Panjang jalan tanah	16 km
Panjang jalan aspal antar desa/kecamatan	64 km
Panjang jalan makadam antara desa/kecamatan	16 km

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa panjang jalan aspal sepanjang 80 km, panjang jalan makadam sepanjang 48 km, panjang jalan tanah 16 km, panjang jalan aspal antara desa/kecamatan 64 km, dan panjang jalan makadam antara desa/kecamatan 16 km.

Tabel 3

Prasarana Irigasi

Nama	Keterangan
Panjang saluran primer	17.600 m
Panjang saluran skunder	24.400 m
Panjang saluran tersier	16.000 m
Jumlah pintu sadap	16 unit
Jumlah pintu pembagi air	96 unit

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009

Dari tabel prasarana irigasi dapat disimpulkan bahwa panjang saluran primer 17.600 m, panjang saluran skunder 24.400 m, panjang saluran tersier 16.000 m, jumlah pintu sadap sebanyak 16 unit, dan jumlah pintu pembagi air sebanyak 96 unit.

Tabel 4

Prasaran Pemerintahan

Nama	Keterangan
Kantor Kecamatan	1 Unit
Koramil	1 Unit
Kapolsek	1 Unit
Puskesmas	1 Unit
Balai Desa	22 Unit

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel prasarana pemerintahan dapat dismpulkan bahwa Kantor Kecamatan terdapat 1 unit, koramil 1 unit, kapolsek 1 unit, puskesmas 1 unit, puskesmas 1 unit, dan Balai Desa 22 unit.

Tabel 5

Prasarana Olaraga

Nama	Keterangan
Lapangan Sepak Bola	22 Buah
Lapangan Bola Volly	66 Buah
Lapangan Badminton	10 Buah

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009

Dari tabel prasarana olah raga dapat disimpulkan bahwa jumlah lapangan sepak bola ada 22 buah, lapangan bola volly 66 buah, dan lapangan badminton terdapat 10 buah.

3. Demografi (Kependudukan)

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terdiri dari laki-laki 40.223 Jiwa sedangkan yang perempuan 40.841 Jiwa, jadi jumlah keseluruhan Masyarakat Porong Kabupaten Sidoarjo sebanyak 81.064 Jiwa.

Tabel 6

Mata Pencaharian

Nama	Keterangan
Petani	5.497 Jiwa
Buruh Tani	3.911 Jiwa
Wiraswasta/ Pedagang	767 Jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertukangan	721 Jiwa
Jasa	788 Jiwa
Pemulung	71 Jiwa
Pensiunan	314 Jiwa
PNS	203 Jiwa
TNI	237 Jiwa
POLRI	655 Jiwa
Pegawai Swasta	7.518 Jiwa

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa mata pencaharian petani 5.497 Jiwa, buruh tani 3.911 Jiwa, Wiraswasta/ Pedagang 767 Jiwa, Pertukangan 721 Jiwa, Jasa 788 Jiwa, Pemulung 71 Jiwa, Pensiunan 314 Jiwa, PNS 203 Jiwa, TNI 237 Jiwa, POLRI 655 Jiwa, dan Pegawai Swasta 7.518 Jiwa.

4. Nama-Nama Desa dan Kepala Desa

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo memiliki 19 Desa dan di kepalai oleh kepala desa

Tabel 7

Nama Desa, Kepala Desa dan Alamat Balai Desa

Nama Desa	Nama Kepala Desa	Alamat Balai Desa
Porong	Wadi S.H	Jl. Pesantren No. 26 Porong Tlp: (0343) 853243
Mindi	MISLAN, SH	Jl. KH. Marzuki No. 85 Porong Tlp: (0343) 854279
Juwet Kenongo	ERMONO WAHYUDI.S.Sos	Jl. Bhayangkari No. 100 Porong Sidoarjo
Jati Rejo	H. SAMAD	Jl. Pondok Pesanten Porong Tlp: (0343) 852934
Gedang	PRAWONO S.Pd	Jl. WR Supratman Porong Tlp: (0343) 856729

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siring	H.MOCH PA'IN GHOZALI	Jl. Diponegoro No. 01 Porong Tlp: (0343) 853846
Reno Kenongo	SUBAKHRI	Jl. Achmad Yani Porong Sidoarjo
Glaga Harum	RIDA KUSWATI	Jl. Glagaharum Porong Sidoarjo Tlp: (0343) 857189
Plumbon	SUPRIYADI	Jl. Desa Plumbon Porong Tlp: (0343) 854154
Pesawahan	PADIL	Jl. Arjuno Pesawahan Porong Tlp: (0343) 854822
Kebakalan	SUGIONO	Jl Kebakalan Porong Sidoarjo Tlp: (0343) 850059
Kedung Boto	YUSUP	Desa Kebun boto
Kebon Agung	KOLIK	Jl. Jend. Sudirman No 12
Pamotan	A. SUPRATMAN	Jl.Pamotan Porong Sidoarjo Tlp: (0343) 854610
Candi Pari	PURWANTO	Jl Purbakala Porong Sidoarjo Tlp: (0343) 854536
Kesambi	ACH. RUBAI	Jl. Darma Husada II
Lajuk	ISWAN	Jl Joyo Leksono Porong Tlp: (0343) 850059
Kedung Solo	M. MASYKUR	Jl. Kedung Solo
Wunut	IMAM BUSTOMI	Jl. Sumber Mulyo No. 03 Porong Tlp:(0343) 854610

Sumber: Monografi Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Th 2009.

B. Penyajian Data

1. Bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur lapindo di kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Tragedi lumpur panas Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, tak kunjung terselesaikan, jelang 4 tahun umur luapan lumpur Lapindo sekitar lebih dari 100 ribu warga tak tentu nasibnya. Sebaliknya, Aburizal Bakrie sang pemilik Lapindo justru mendapat tempat istimewa di sisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai-partai berkuasa. Tak hanya setia melindungi Abu rizal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakrie, kini partai berkuasa berkonsolidasi dalam sebuah koalisi gabungan atau membentuk sekretariat bersama yang mana diketuai sendiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretarisnya Aburizal Bakrie. Inilah potret perselingkuhan pemimpin negeri dengan pebisnis. Dari sebuah perselingkuhan inilah menjadi faktor kuat berlarutnya penuntasan dalam kasus lumpur Lapindo.[1]

Problem bencana luapan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, memakan korban ribuan rumah penduduk, puluhan pabrik, dan sarana sosial yang lain terendam lumpur, keresahan-keresahan mulai menghinggapi benak masyarakat setempat dan persoalanpun menjadi semakin berkembang, tidak hanya menyangkut persoalan menghentikan semburan lumpur saja, akan tetapi bertambah menjadi persoalan hilangnya tatanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Kepala keluarga yang rumahnya terendam lumpur, tidak hanya kehilangan rumah saja, mereka juga kehilangan materi, kehangatan penghuni rumah dalam lingkungan yang damai. Tergusur dari kampung halaman karena terendam lumpur panas Lapindo, masyarakat korban lumpur Lapindo mempunyai persoalan yang sama, yaitu hilangnya tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat yang sudah berkomunitas mempunyai kedekatan emosional yang tinggi, karena mereka terikat oleh sejarah.

Dapat terbayangkan oleh kita, rasa yang ada dalam jiwa meraka tentulah kemarahan dan kekecewaan yang tinggi, karena mereka harus terhapus dari

---

[1]jakartaperss.com, Jumat (21/5/2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarahnya dan mereka kehilangan mata pencahariannya di karenakan pabrik-pabrik mereka terendam lumpur Lapindo. Dari perasaan yang sama inilah masyarakat korban lumpur Lapindo dalam melakukan sebuah gerakan kemasyarakatan terdapat dua bentuk beberapa pola antara lain:

a. Musyawarah.

Musyawarah ini dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo-PT. Lapindo Brantas dan Pemrintah Kabupaten Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 15 juli 2007 di pendopo kabupaten Sidoarjo. Adapaun hasil dari pertemuan di pendopo ini menjadi sebuah keputusan presiden nomor 14 tahun 2007.

P: Bagaimana cara para kepala desa terdampak untuk menampung aspirasi masyarakatnya?

J: "Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan ganti rugi terhadap tanah mereka yang terendam lumpur lapindo, ini kita tamping dulu dan selanjutnya kita laporkan kepada pihak kecamatan selanjutnya akan diteruskan kepada kabupaten melalui BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)".[2]

Tidak hanya berhenti di sini saja masyarakat korban lumpur Lapindo yang diwakili oleh warga perumahan Tanggulangin Asri juga berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan PT. Lapindo Brantas, menteri kabinet bersatu dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para korban meminta ganti rugi *cas and carry* (Rabu, 3 Desember 2007).

---

[2] H. Samad (Kepala Desa Jatirejo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap melakukan rapat, mereka menghasilkan beberapa tuntutan untuk persiapan acara aksi. Diantara beberapa isi pokok tuntutannya adalah:

Mereka mempertanyakan empat hal. Pertama, pembayaran terjadinya mafia hukum keluarnya SP3 oleh Kepolisian Jawa Timur untuk menghentikan penyelidikan kasus Lapindo. Putusan perkara perdata Walhi dan YLBHI yang menjadi rujukan kepolisian untuk mengeluarkan SP3 tidak tepat karena perbedaan kontek antara sistem perdata dan pidana. Dalam pidana, pemerintah wajib berperan aktif melindungi warga negara dari tindak pidana kejahatan, Faktanya sulit diterima akal sehat, penyidik negara tidak aktif, justru menghentikan upaya penyelidikannya.

Kedua, Kebijakan-kebijakan SBY, yang justru menguntungkan Aburizal Bakrie. Salah satunya, penggunaan anggaran APBN menangani lumpur ini. Pada Pasal 15 A Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo disebutkan, "Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan pada APBN."

Ketiga. Penanganan ala kadarnya sehingga mengesankan luapan lumpur Lapindo tidak mungkin ditangani, jelas-jelas ini menguntungkan pihak Aburizal Bakrie. Celakanya, justru berpotensi meluaskan daya rusak luapan lumpur. Persoalan sosial kian meluas seiring dibuangnya Lumpur Lapindo ke Kali Porong menuju laut. Padahal, Kali Porong sumber pengairan lebih dari 4.000 hektar tambak di Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buangan ini akan masuk dan merusak tambak, serta meracuni udang dan ikan di dalamnya. Kerusakan meluas terjadi beresiko mengganggu sekitar 40 sampai 50 persen produksi perikanan laut Jawa Timur, tidak bisa berjalan normal. Padahal, perikanan tambak merupakan unggulan Kabupaten Sidoarjo, kawasan dengan luasan tambak organik terbesar di Indonesia. Sekira 30 persen ekspor udang Indonesia berasal dari tambak Sidoarjo dengan nilai produksi sekira Rp 800 miliar per tahun. Dampak serupa juga akan dialami ribuan nelayan di pesisir Sidoarjo, Madura, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo yang terancam kehilangan sumber penghidupan.

Keempat, tak ada upaya penyelamatan warga. Seperti diramalkan, penanganan dengan pendekatan "jual beli" justru absen jaminan terhadap keselamatan warga. Lagi-lagi menguntungkan Bakrie. Korban Lapindo dijauhkan dari hak-hak dasarnya, mulai jaminan keamanan, hidup sehat hingga jaminan pendidikan. Hilangnya mata pencaharian orang tua menyebabkan banyak anak putus sekolah. Akibat luapan lumpur Lapindo, siswa SDN Kedungbendo awalnya berjumlah 553 orang dan kini hanya tersisa 30 orang. Lebih parah lagi, dari 15 orang tenaga pendidik, kini tersisa 3 orang.

Sudah waktunya pengurus negeri sadar diri dan menghentikan perselingkungannya dengan pengusaha. Sudah waktunya berpihak pada warganya. Oleh karenanya, Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo mendesak kepada pemerintah untuk: (1) Menindak tegas PT. Lapindo Brantas segera menuntaskani kewajibannya; (2) Melakukan pemulihan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan religiusitas masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta; (3) Memobilisasi upaya untuk menangani luapan lumpur dan menghentikan pembuangannya ke laut.[3]

b. Demonstrasi.

Demontrasi dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo dilakukan di karenakan tuntutan ganti rugi seharusnya dibayar tepat tanggal 28 Mei 2008 tersendat-sendat. Mereka melakukan pemblokadean jalur truk sirtu di KM-40 bekas jalan tol Porong-Gempol. (Minggu, 3 Juli 2008).

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi yang mereka lakukan dalam peringatan setahun menyemburnya lumpur Lapindo yang tepatnya tanggal 29 Mei 2007. "Hingga kini pemerintah belum menjamin atau memberikan keputusan atas tuntutan mereka", ujar Mursyid koordinator aksi.

Selain pemblokadean, masyarakat korban lumpur Lapindo juga mengusung balok-balok kayu dan bongkahan batu ke tengah jalan, meraka juga melarang truk-truk pengangkut sirtu untuk penguatan tanggul cincin melewati akses jalan tersebut.

Masyarakat juga mengelar aksi duduk di tengah jalan raya Porong dan melakukan aksi demontrasi di Jakarta, tepatnya tanggal 27 September 2008.[4]

Masyarakat Korban lumpur Lapindo dalam melakukan gerakan ada tiga pola yang dipakai:

---

[3]Dokumen Gerakan Mayarakat Peduli Lumpur

[4] Atoirrochim (Kordinator Masyarakat Peduli Rakyat Sidoarjo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pola Irasional.

Pada pola ini terjadi sebuah gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo dengan tanpa henti-hentinya masyarakat porong mengelar sepanduk di tanggul pusat semburan yang meminta pemerintah bertindak supaya semburan lumpur dengan cepat diselesaikan melalui solusi ditutup.[5]

Interview:

P: bagaimana kondisi masyarakat korban lumpur Lapindo kecamatan Porong di penampungan pasca ditimpa luapan lumpur Lapindo?

Secara psikologi massa yang sudah hampir empat Tahun berjuang ini, disadari betul oleh panitia penyelenggara peringatan 3 tahun Lumpur Lapindo. Hal ini terlihat dari susunan acara yang disiapkan. Selain pembukaan protokoler dari panitia yang antara lain berupa menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dimana sang pembawa acara yang berada di atas panggung terpaksa dibantu secara spontan oleh seseorang yang muncul dari bawah panggung ketika menyanyikan lagu kebangsaan tersebut karena ternyata ia tidak hapal. pertunjukan seni pun tidak lupa dibawakan oleh beberapa masyarakat yang ada di sekitar semburan lumpur lapindo. seorang musisi kreatif dari Surabaya dengan "gitar" bambunya, serta tentu saja pengayaan perspektif, agitasi dan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan itu seperti Kiyai Haji Sholahuddin

---

[5] Himamuddin, Warga Siring,Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng; Pak Kabul dari Komnas HAM; Pak Tjuk Sukiadi dari Universitas Airlangga; Pak Arkam, seorang aktivis partai Demokrat dan juga seorang tokoh masyarakat Jawa Timur, Pak Bambang yang juga anak Bung Tomo seakan mampu melupakan rasa sedih masyarakat yang sudah sekian tahun menderita.

Yang lebih ironis adalah masa depan anak-anak korban lumpur Lapindo. Masa depan mereka menjadi tidak jelas. Keceriaan dan masa depan mereka turut tenggelam oleh lumpur Lapindo. Untuk melanjutkan sekolah saja, mereka kesulitan biaya. Setidaknya ada 103 anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMU/STM pada tahun ajaran baru nanti, 2010/2011, belum pasti apakah mereka masih dapat menikmati bangku sekolah kembali. Bahkan di antaranya ada yang telah putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu lagi membiayai pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari, sementara biaya sekolah terus naik.

"Kondisi masyarakat di sini (korban lumpur Lapindo kecamatan Porong) di tempat penampungan semakin memperhatinkan, sedangkan mau pulang saja rumah sudah terendam lumpur, mau pindah juga tidak punya uang, sekarang harapan kita sudah tidak ada mas, hiburan demi hiburan yang seperti ini mungkin sekilas yang membuat hati kita semua senang walaupun harapan masa depan kita tidak bisa diharapkan apalagi nasib anak-anak yang sudah putus sekolah..... ".[6]

b. Pola Rasional.

Pada pola ini masyarakat korban lumpur Lapindo dalam melakukan gerakan meminta ganti rugi kepada PT. Lapindo Brantas. Pada kesempatan itu

---

[6] Susanto, Warga Jati Rejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para korban lumpur lapindo mengadakan musyawarah yang di lakukan oleh masyarakat banyak termasuk mereka para korban lumpur Lapindo. Pada tanggal 15 juli 2007 bertempat di pendopo kabupaten Sidoarjo, masyarakat korban lumpur Lapindo mengadakan musyawarah dengan pihak dari PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hasil dari pertemuan itu menjadi sebuah keputusan Presiden nomor 14 tahun 2007. Pada tahapan ini di lakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo di karenakan masyarakat melihat bahwa menutup semburan lumpurn tidak mungkin dapat di lakukan.

Tidak hanya berhenti di sini saja, masyarakat korban lumpur Lapindo yang diwakili oleh warga perumahan Tanggulangin Asri juga berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan PT. Lapindo Brantas, menteri kabinet bersatu dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat korban lumpur Lapindo meminta ganti rugi *cass and carry.* (Rabu, 3 Desember 2007). Akan tetapi masyarakat korban lumpur Lapindo yang semula mengharapkan ganti rugi penuh mengalami Kabinet Indonesia Bersatu mengusulkan agar pihak PT. Lapindo melakukan pembayaran dengan cara mencicil 20% dan sisanya yang 80% akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2008.

tentang Badan penanggulangan lumpur Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Perpres No.14 Tahun 2007 Sidoarjo (BPLS) menyatakan.

"Dana jual beli dilakukan dengan cara bertahap, sebanyak 20% di bayar di muka, dan sisanya paling lambatdi bayar sebulan sebelum masa kontrak rumah habis yaitu 80% pada tanggal 28 mei 2008".[7]

---

[7] www.gib.or.id/isibuletin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interview:

P: Apakah yang menyebabkan masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melakukan gerakan menuntut ganti rugi terhadap PT. Lapindo Brantas?.

Pertama masyarakat yakin bahwa semburan itu bisa ditutup, tentunya upaya itu harus dilakukan oleh pemerintah lokal dan pemerintah pusat yang sama-sama harus bertanggungjawab. Ini bisa dilihat orasinya Gus Sholah,[8] mengacu pada pendapat klub ahli pemboran (*Drilling Engineers Club*), meyakini bahwa semburan lumpur dapat ditutup, hanya saja pemerintah sampai sekarang belum memperlihatkan niat yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan penutupan semburan lumpur. Semburan lumpur adalah kesalaan manusia, bukan bencana alam.

Kedua, harus dituntaskan pembayaran ganti rugi 80% terhadap aset warga yang tenggelam. Dan *ketiga*, pemerintah juga harus ganti rugi untuk warga di desa-desa yang terletak di luar peta terdampak. Karena desa-desa yang berada di luar peta terdampak versi pemerintah juga sejatinya terkena dampak bencana lumpur Lapindo.

"Ketidakjelasan dari PT. Lapindo Brantas dan sikap pemerintah yang tidak tanggap terhadap kondisi masyarakat Porong, sehingga kami seluruh masyarakat korban lumpur lapindo sepakat untuk melakukan gerakan sampai pihak PT. Lapindo Brantas membayar ganti rugi rumah kami. Sudah hampir empat tahun ini kita hanya di beri janji dan janji... kita semua sudah jenuh dengan janji pemerintah mas... mereka diam saja , seakan-akan buta dengan kondisi rakyat yang setiap hari

---

[8] http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0278&ikey=1 05-Mei-2010 jam 21,15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada yang memperhatikannya. Keputusan mereka tidak tegas (pemerintah), kalau sekarang bilang ia besok sudah berganti tidak". [9]

c. Pola Dekonstruksi.

Pada pola ini, masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sebuah gerakan, karena mereka menganggap gerakan yang dulu pernah dilakukan dengan menuntut ganti rugi secara penuh tidak sesuai karena pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) PerPres no.14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan, dana jual beli dilakukan dengan cara bertahap, sebanyak 20% dibayar dimuka, dan sisanya paling lambat dibayar sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis yaitu 80% pada tanggal 28 Mei 2008.

Akan tetapi kesepakatan yang pernah dibuat ini dilapangan tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat korban lumpur lapindo dan pembayaran sisa yang 80% menjadi tersendat-sendat, dari sinilah sehingga menjadi sebuah persoalan yang melahirkan sebuah gerakan-gerakan kemasyarakatan terhadap PT. Lapindo Brantas. Dan gerakan itu berkembang menjadi sebuah gerakan menuntut relokasi penuh yang harus dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.

Diluar dari konflik ganti untung yang dituntut masyarakat korban lumpur lapindo, persoalan pendidikan, sosial dan gangguan mental yang dialami oleh

---

[9] M. Zakariayah, Ketua Gerakan Korban Lumpur (Gempur)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo semakin berat. Oleh karena itu pemerintah harus lebih arif dalam menyikapi persoalan ini.

Interview:

P: Dalam implementasinya PT. Lapindo Brantas terkesan kurang memperhatikan masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, tetapi masyarakat tetap semangat dalam menyuarakan aksinya, apakah yang menjadikan masyarakat Porong sampai hari ini masih bertahan?.

Gerakan warga korban lumpur Lapindo sendiri dalam menuntut ganti rugi bagi mereka adalah sebuah gerakan sosial yang sangat panjang dan melelahkan. Dalam kondisi tertekan secara psikologi akibat menjadi pengungsi, pada saat yang sama korban juga harus tetap berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Saat ini rata - rata warga korban sudah berada di tempat pemukiman yang baru, baik yang mendapatkan ganti rugi di perumahan Kahuripan Nirwana Villlage, yang menumpang di rumah sanak saudara, ataupun yang mengontrak rumah baru. Selama tiga tahun ini kepala para korban dibombardir dengan 'realitas-realitas kering tapi riil' seperti ganti rugi, *cash and carry* pembayaran 20% dan 80%, rapat-rapat, demosntrasi, dan seterusnya. Kegiatan kesenian mungkin dapat menyegarkan kembali pemikiran warga. Refleksi sebentar dan kemudian bergerak lagi memperjuangkan haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kebersamaan dan persamaan rasa kehilangan dimasing-masing individu yang menjadikan kami masih bertahan dalam menyuarakan aspirasi ini".[10]

Menurut organisasi masyarakat sipil peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo, penanganan alakadarnya mengesankan luapan lumpur tak mungkin ditangani, jelas-jelas menguntungkan perusahaan pengebor. Sebaliknya kondisi pembiaran penanganan ini berpotensi meluaskan daya rusak luapan lumpur. Persoalan sosial kian meluas seiring dibuangnya lumpur Lapindo ke sungai Porong menuju laut.

"Anak-anak kesulitan bersekolah. Kesehatan dan kebutuhan hidup masyarakat juga tidak nyaman dan cenderung terancam." tegas Halim.

Novik mengatakan bahwa Kali Porong merupakan sumber pengairan lebih dari 4000 hektar tambak di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Tak ayal, buangan lumpur ke Kali Porong akan masuk dan merusak tambak serta meracuni udang dan ikan di dalamnya. Meluasnya kerusakan ini menurut Halim, berisiko mengganggu sekitar 40 sampai 50 persen produksi perikanan laut Jawa Timur tidak bisa berjalan normal dan menurun drastis seperti yang disebutkan data Menteri Perikanan dan Kelautan (DKP) periode sebelumnya.

Padahal perikanan tambak merupakan unggulan Kabupaten Sidoarjo, kawasan dengan luasan tambak organik terbesar di Indonesia. Sekitar 30 persen ekspor udang Indonesia berasal dari tambak Sidoarjo dengan nilai produksi sekitar Rp 800 miliar per tahun. Dampak serupa juga akan dialami ribuan nelayan

---

[10] A. Novik (SekJend FPPLS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pesisir Sidoarjo, Madura, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo yang terancam kehilangan sumber penghidupan.

2. Proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat masyarakat korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

a. Sosialisasi

Bahwa pada kenyataannya semburan lumpur yang terjadi karena adanya pengeboran minyak oleh Lapindo Brantas disebabkan oleh kelalaian perusahaan.

Dampak dari semburan lumpur Lapindo berimbas pada berubahnya pranata-pranata sosial yang ada di tempat tersebut. Dampak – dampak yang dirasakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat akan bahaya lumpur Lapindo.

Proses sosialisasi ini (penyadaran) di samping muncul dari internal masyarakat setempat, juga di pengaruhi dari eksternal melalui peran Lembaga swadaya yang terlibat aktif dalam membantu korban semburan lumpur.

Interview:

P: Dalam melakukan pendampingan kepada para korban lumpur lapindo cara apa saja yang dilakukan oleh LSM tuk menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat mau melakukan gerakan untuk menuntut haknya?

Masyarakat korban lumpur lapindo dalam mengadapi persoalan ini terasa begitu panik sehingga mereka hanya menginginkan penutupan semburan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J: "Kita melihat persoalan yang terjadi di Porong begitu kompleks tidak hanya menutup semburan saja, akan tetapi terndamnya ribuan rumah dan hilangnya mata pencaharian serta hubungan sosial yang terjadi mengakibat kita untuk ikut merasakan dan bertanggung jawab menyadarkan masyarakat untuk juga melakukan tuntutan ganti rugi *cass and carry*".[11]

b. Mobilisasi

Perubahan – perubahan pranata sosial yang terjadi di masyarakat karena di sebabkan adanya bencana semburan lumpur Lapindo menyebabkan masyarakat melakukan mobilisasi dengan cara membentuk elemen masyarakat korban semburan lumpur, setelah itu masyarakat melalkuakan aliansi – aliansi dengan menggunakan symbol – symbol untuk memperjuangkan hak mereka.

Interview:

P: Apakah yang dilakukan MWCNU dalam menyikapi persoalan yang dialami oleh masyarakat Porong terutama warga Nahdliyin?

J: "Korban lumpur panas lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo memakan korban yang begitu banyak dan yang paling merasakan adalah warga Nahdliyin, sehingga kita mengintruksikan kepada Badan Otonom Nahdlatul ulama' untuk bersama-sama merapatkan barisan bersama masyarakat nahdliyin untuk menuntut hak kita kepada PT.Lapindo Brantas di samping MWCNU melakukan usaha lahir jangan lupa juga usaha batin.....".[12]

---

[11] M. Faizul Faizun (Koordinator Kelompok Kerja Nahdliyin)

[12] H. Nasikhuddin (Ketua MWCNU Porong)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Aksi

Aliansi – aliansi yang dilakukan oleh masyarakat korban semburan lumpur mengarah pada gerakan –gerakan aktif dengan issu penutupan semburan, pembayaran ganti rugi (*cash and carry*) dan relokasi penuh.

Aksi ini dilakukan masyarakat korban semburan lumpur melalui tahapan – tahapan mediasi dengan Pemerintah Daerah Tk.II,Pemerintah Daerah Tk.I sampai Pemerintah pusat, disamping itu juga dilakukan mediasi dengan PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Aksi masyarakat korban semburan tidak hanya berhenti pada mediasi,akan tetapi juga melalui demonstrasi kepada seluruh lapisan Pemerintahan dari Daerah sampai pusat.

C. Analisis Data.

1. Bentuk Gerakan Kemasyarakatan yang terjadi pada Masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

a. Musyawarah

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo dengan pihak PT. lapindo brantas dan pemerintah kabupaten sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 15 juli 2007 di pendopo kabupaten sidoarjo.

Bentuk gerakan ini sebagai langkah awal menemukan sebuah solusi bersama yaitu ganti rugi 100% yang juga diputuskan menjadi sebuah keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden nomor 14 tahun 2007 dengan perincian 20% dibayar dimuka dan sisanya 80% di bayar dikemudian hari.

Musyawarah adalah sebuah bentuk gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh teori mobilisasi sumber daya yang di ungkapkan oleh Zald dan Roberta Ash bahwa "mobilisasi sumber daya dilakukan atas dasar persamaan nasib yang sama".[13]

b. Demonstrasi

Demonstrasi dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo kecamatan porong kabupaten sidoarjo setelah melihat bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. lapindo brantas yang relita dilapangan mengalami tersendat-sendat dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, maka muncullah sebuah kekecewaan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh masyarakat korban lumpur lapindo terhadap struktur yang ada. Sebagaimana dalam teori ketegangan struktural dijelaskan bahwa "penolakan tindakan-tindakan terhadap hubungan-hubungan struktur yang ada dan berada secara independen dari motivasi-motivasi individual".

Akhirnya masyarakat korban lumpur lapindo ke Jakarta menuntut relokasi penuh.

2. Proses Gerakan Kemasyarakatan yang terjadi pada Masyarakat korban lumpur Lapindo di kecamatan Porong, Kabipaten Sidoarjo.

---

[13] Zald dan Roberta Ash, 1966, *"Social Movement Organizations"*. Sosial Forcesh, h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil data yang disajikan mengenai beberapa tahapan atau proses gerakan kemasyarakat antara lain:

a. Sosialisasi

Bahwa pada kenyataannya semburan lumpur yang terjadi karena adanya pengeboran minyak oleh Lapindo Brantas disebabkan oleh kelalaian perusahaan.

Dampak dari semburan lumpur Lapindo berimbas pada berubahnya pranata-pranata sosial yang ada di tempat tersebut. Dampak – dampak yang dirasakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat akan bahaya lumpur Lapindo.

Proses sosialisasi ini (penyadaran) di samping muncul dari internal masyarakat setempat, juga di pengaruhi dari eksternal melalui peran Lembaga swadaya yang terlibat aktif dalam membantu korban semburan lumpur.

b. Mobilisasi

Perubahan – perubahan pranata sosial yang terjadi di masyarakat karena disebabkan adanya bencana semburan lumpur Lapindo menyebabkan masyarakat melakukan mobilisasi dengan cara membentuk elemen masyarakat korban semburan lumpur, setelah itu masyarakat melakukan aliansi – aliansi dengan menggunakan symbol – symbol untuk memperjuangkan hak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Aksi

Aliansi – aliansi yang dilakukan oleh masyarakat korban semburan lumpur mengarah pada gerakan –gerakan aktif dengan issu penutupan semburan, pembayaran ganti rugi (*cash and carry*) dan relokasi penuh.

Aksi ini dilakukan masyarakat korban semburan lumpur melalui tahapan – tahapan mediasi dengan Pemerintah Daerah Tk.II,Pemerintah Daerah Tk.I sampai Pemerintah pusat, disamping itu juga dilakukan mediasi dengan PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Aksi masyarakat korban semburan tidak hanya berhenti pada mediasi saja, akan tetapi juga melalui demonstrasi kepada seluruh lapisan Pemerintahan dari Daerah sampai pusat.

Dalam melakukan gerakannya masyarakat korban lumpur lapindo menggunakan beberapa pola antara lain:

1) Pola Irasional.

Pada tahapan ini terjadi sebuah gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo dengan memasang sepanduk di tanggul pusat semburan yang meminta supaya semburan lumpur Lapindo ditutup dan juga melakukan ritual-ritual mistik mulai dari menyembelih ayam hitam pekat, domba Sembilan sampai menyeburkan sapi ke pusat semburan dan juga ada yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istighosah seperti apa yang terjadi pada 4 tahun peringatan lumpur lapindo di Gor Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2010.

Selama empat tahun hingga sekarang, penanganan kasus lumpur Lapindo terbatas hanya menangani masalah lumpur dan sosial berupa jual beli/ganti rugi serta jaminan hidup warga di pengungsian. Padahal persoalan sosial yang ditimbulkan sungguh komplek termasuk masalah kesehatan dan kesejahteraan. Belum lagi penanganan lumpur pun lebih menyiasati tanggul dan pembuangan lumpur saja. Tidak ada upaya jelas untuk menghentikan semburan lupur yang pernah dilakukan di awal-awal semburan.

Ribuan rumah, puluhan pabrik, dan sarana sosial yang lain terendam lumpur, persoalanpun menjadi berkembang, tidak hanya menyangkut persoalan menghentikan semburan saja, akan tetapi bertambah menjadi persoalan hilangnya tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Porong Kabupaten Sidoarjo.

Ribuan kepala keluarga yang rumahnya terendam lumpur, tidak hanya kehilangan rumah mereka juga kehilangan materi, sanak keluarga dan kenyaman dalam lingkungan yang damai.

Tergusur dari kampung halaman karena terendam luapan lumpur lapindo, masyarakat desa yang satu dengan desa lainnya mempunyai persoalan yang sama, yaitu hilangnya tatanan sosial-ekonomi-budaya. Masyarakat yang sudah berkomunal tentulah mempunyai kedekatan emosionalyang tinggi, karena mereka terikat oleh sejarah. kemarahan dan kekecewaan yang tinggi, karena mereka harus terhapus dari . sejarahnya, dan mereka kehilangan mata pencahariannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan pabrik-pabrik yang menjadi tempat mereka bekerja terendam lumpur lapindo. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh TR. Gurr dalam sebuah teorinya perampasan relativ *(Relative deprivation model).* Model ini mengemukakan bahwa gerakan-gerakan kemasyarakatan terbentuk jika orang-orang menganggap atau melihat diri mereka relativ terampas (hak-hak dan harta mereka). Melihat proses gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo inilah sangat sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh TR. Gurr.

2) Pola Rasional

Pada tahapan ini masyarakat korban lumpur lapindo dalam melakukan gerakan menuntut ganti rugi kepada PT. lapindo brantas, yang mana pada kesempatan ini para korban lumpur lapindo yang tergabung dalam gerakan masyarakat korban lumpur lapindo (GMKLL) yang didalamnya terdiri atas beberapa elemen (FPPLS, GEMPUR, KKN, MPRS, IPNU, MWCNU, WARGA dan Kepala Desa). [14]Mengadakan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo-PT. lapindo brantas dan pemerintah kabupaten sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 bertempat dipendopo kabupaten sidoarjo.yang mana hasil dari pertemuan dipendopo ini menjadi sebuah keputusan presiden nomor 14 tahun 2007. Pada tahapan ini dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindob dikarenakan masyarakat melihat bahwa menutup semburan lumpur tidak mungkin dapat dilakukan.

---

[14] H. Pain Ghazali, Kepala Desa Siring, Kecamatan Porong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya berhenti disini saja masyarakat korban lumpur lapindo yang diwakili oleh warga perumahan tanggulangin asri juga berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak PT. Lpindo Brantas, menteri kabinet bersatu dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka juga meminta ganti rugi yang berbentuk *cass and carry*, (Rabu, 3 desember 2007). Akan tetapi masyarakat korban lumpur lapindo yang semula mengharapkan ganti rugi mengalami kekecewaan yang besar, ini dikarenakan oleh pihak PT. lapindo brantas dan para menteri kabinet Indonesia bersatu mengusulkan agar pihak PT. lapindo brantas melakukan pembayaran dengan cara bertahap 20% dan sisanya 80% akan dibayarkan di kemudian hari.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Perpres no.14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo (BPLS) menyatakan, dana jual beli dilakukan dengan cara bertahap, sebanyak 20% dibayar dimuka, dan sisanya paling lambat dibayar sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahunj habis yaitu 80% . sesuai dengan apa yang diungkapkan Teori Mobilisasi Sumber Daya, meminjam istilah Max Weber, 'Teori Sumber Daya menempatkan rasionalitas-cara (means-rationality) sebagai nilai tambah, yakni dengan menempatkan analisis tentang penggabungan aneka bentuk, strategi, dan taktik organisasi secra sengaja dan sadar dengan tujuan-tujuan yang mau dicapai.

Zald dan Roberta Ash, mengungkapkan "elemen-elemen kunci dari gerakan-gerakan kemasyarakatan adalah organisasi-organisasi gerakan, bukan individu-individu. Organisasi-organisasi merupakan unit-unit penggerak dari sebuah gerakan kemasyarakatan".[15]

---

[15] Zald dan Roberta Ash, 1966, *"Social Movement Organizations"*. Sosial Forcesh, h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat proses gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat korban Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo inilah sangat sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Zald dan Roberto Ash.

3) Pola Dekonstruksi

Masyarakat korban lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sebuah gerakan karena mereka menggangap gerakan yang dulu pernah dilakukan dengan menuntut ganti rugi secara penuh tidak sesuai karena pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Perpres no.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo (BPLS) menyatakan, dana jual beli dilakukan dengan cara bertahap, sebanyak 20% dibayar di muka, dan sisanya paling lambat dibayar sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis yaitu 80% .

Akan tetapi kesepakatan yang pernah dibuat dilapangan tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat korban lumpur lapindo dan sisa pembayaran yang 80% menjadi tersendat-sendat, dari sinilah sehingga menjadi sebuah persoalan yang melahirkan sebuah gerakan-gerakan kemasyarakat terhadap PT. lapindo brantas. Dan gerakan itu berkembang menjadi sebuah gerakan menuntut diadakannya relokasi penuh yang harus dilakukan oleh pihak PT. lapindo brantas.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh James Davies dalam teorinya ketegangan structural mengacu pada penolakan tindakan-tindakan dan hubungan-hubungan, dan berada secara independen dari motivasi-motivasi individual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo Menurut Para Ahli Geologi:

Menurut Seno Puji Sarjono (ahli geologi Institut Teknologi Sepuluh November)

"Semburan lumpur panas Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh dua patahan kulit bumi yang berada dibawah permukaan jalan tol dan di Desa Renokenongo. Retakan itu ada di kedalaman 6.000 meter, lebih dalam dari sumur lapindo yang baru mencapai kedalaman 3.000 meter"[16].

Menurut Mulyo Guntoro (Pusat Studi Bencana UPN Surabaya)

"Pengeboran di kedalaman 2 kilometer seharusnya miring, bukan lurus seperti apa yang dilakukan ole pihak PT. Lapindo Brantas saat ini."[17]

Menurut Edy Sunardi (Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia)

"Pada dasarnya fluida-fluida yang secara progresif terkonsentrasi dibawah permukaan bumi, dapat mengalami semburan ke permukaan jika ada cukup tekanan dan temperatur. Kondis itu selanjutnya dapat terpenuhi apabila ada jalur terbuka seperti rekahan atau patahan."[18]

---

[16] Muhammad Mirdasy, *Bernafas dalam lumpur lapindo* (Surabaya: Mirdasy Institute For Publik Policy (MIPP), 2007), h.74.

[17] *Ibid, h.8.*

[18] *Ibid, h.9.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kronologi Semburan Lumpur Lapindo

29 Mei 2006

Lumpur panas keluar dari retakan tanah di bagaian timur sumur pengeboran milik Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

2 Juni 2006

Sekitar 1.500 warga Desa Renokenongo di evakuasi menyusul munculnya banjir lumpur panas di permukiman mereka.

5 Juni 2006

Lumpur mengenangi 10 hektar tanah warga sekitar dan mengalir ke jalan tol Gempol-Surabaya, yang berjarak sekitar 200 meter dari titik pengeboran.

PT. Medco E&P Brantas, rekanan kerja sama operasi pengeboran, mengirim surat ke Lapindo. Medco pada 18 Mei telah mengingatkan Lapindo agar memasang selubung bor (casing) di kedalaman 8.500 kaki untuk mengantisipasi kebocoran.

7 Juni 2006

BP Migas menyatakan perlu minimal 30 hari untuk menghentkan luapan lumpur Lapindo.

8 Juni 2006

Warga Desa Jatirejo, Siring, dan Renokenongo mulai kekurangan makanan serta air bersih. Selain itu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur meminta kepada pihak Lapindo bertanggung jawab atas melubernya lumpur panas di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

9 Juni 2006

Kementerian Lingkungan Hidup meminta pertanggungjawaban Lapindo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10 Juni 2006

Ruas jalan tol Gempol-Surabaya kilometer 8, sabtu sore ditutup. Penutupan dilakukan setelah luapan lumpur panas Lapindo menutupi seluruh ruas jalan tol dan dinilai membahayakan pengguna jalan tol.

12 Juni 2006

Kepada DPRD Jawa Timur, *General Manager* Lapindo, Imam P. Agustino, mengakui mata bor yang patah sengaja di tinggalkan di dalam demi keamanan.

14 Juni 2006

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral BP Migas melakukan investigasi.

15 Juni 2006

Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sutedjo Yuwono, menyatakan kementerian yang di pimpin Aburizal Bakrie ini belum perlu berkunjung langsung ke Sidoarjo. Alasannya, sudah diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Energi. Ketua DPR RI Agung Laksono menilai gerak pemerintah lamban.

16 Juni 2006

General Manager Lapindo, Imam Agustino, membantah luapan lumpur akibat kesalahan timnya dalam pengeboran. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan pengenaan sanksi atas Lapindo masih menunggu hasil tim investigasi.

18 Juni 2006

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Lapindo harus bertanggung jawab.

19 Juni 2006

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro di Surabaya menyatakan, semburan lumpur panas yang menyambur itu bukan akibat gempa bumi, akan tetapi kesalahan pengeboran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20 Juni 2006

Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjau lokasi semburan lumpur panas di sumur eksplorasi gas Banjar panji-1 (BJP-1) milik Lapindo.

21 Juni 2006

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengatakan penanggung jawab banjir lumpur adalah PT. Lapindo Brantas.

22 Juni 2006

Lapindo berjanji mengganti seluruh kerugian 12 perusahaan korban banjir lumpur di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dan, disamping itu pada hari yang sama Markas Besar (Bames) Kepolisian RI menyatakan telah memeriksa 29 saksi berkaitan dengan kasus Lapindo.

28 Juni 2006

Jumlah pengungsi mencapai 6.138 jiwa. Mereka menempati tempat pengungsian di pasar baru Porong dan Balai Desa Renokenongo.

11 Juli 2006

Rahenold dan Slamet Riyanto, *drilling supervisor dan drilling project manager* PT. Medici Citra Nusa, Kontraktor Lapindo, di periksa sebagai tersangka.

24 Juli 2006

Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan *General Manager* Lapindo Brantas, Imam P. Agustino, Presiden PT. Medici Citra Nusa Yeni Nawawi, dan *Vice Drilling Share Service* PT. Energi Mega Persada, Nurrohmad Sawulo sebagai tersangka.

28 Juli 2006

Batas waktu penghentian lumpur dari BP Migas, tapi tak terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31 Juli 2006

Polisi menetapkan Imam P. Agustino, Presiden Direktur PT. Medici Citra Nusa Yeni Nawawi, *Vice Drilling Share Service* PT. Energi Mega Persada Nurrohmad Sawulo, dan Sembilan pengawas pengeboran sebagai tersangka.

3 Agustus 2006

BP Migas memperpanjang tanggal penghentian luapan lumpur hingga akhir Agustus.

10 Agustus 2006

Tanggul di belakang markas Koramil Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo jebol. Luapan lumpur mulai mengenangi rel kereta api.

11 Agustus 2006

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau lokasi dan memberikan bantuan Rp 1 Miliar. Pemerintah menyatakan akan membangun kolam penampungan seluas 764 hektar.

15 Agustus 2006

Kepolisian Daerah Jawa Timur menyita alat bor Lapindo.

8 September 2006

Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

22 November 2006

Terjadi ledakan pipa gas Pertamina. Akibat insiden ini 13 orang meninggal dunia.

4 Desember 2006

Luapan lumpur sudah sangat dramatic menjadi 450 ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 Maret 2007

Pansus Lumpur DPRD Jatim dibentuk, dengan tujuan utama mengawal perjuangan aspirasi warga dalam urusan tuntutan ganti rugi.

6 Apri 2007

BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di bentuk menggantikan Timnas yang sudah berakkhir masa kerjanya. Pada waktu serah terima dari Timnas ke BPLS, luasan lumpur sudah mencapai 680 ha.

Gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah bentuk dan proses gerakan yang didasari oleh kekuatan-kekuatan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat, hak kepemilikan dan pemberontakan terhadap perampasan hak tersebut oleh kelompok industrialisasi, gerakan kemasyarakatan korban lumpur lapindo di Kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo pada dasarnya terjadi menjadi dua bentuk:

a. Musyawarah

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo dengan pihak PT. lapindo brantas dan pemerintah kabupaten sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 15 juli 2007 di pendopo kabupaten sidoarjo.

Bentuk gerakan ini sebagai langkah awal menemukan sebuah solusi bersama yaitu ganti rugi 100% yang juga diputuskan menjadi sebuah keputusan presiden nomor 14 tahun 2007 dengan perincian 20% dibayar dimuka dan sisanya 80% di bayar dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Demonstrasi

Demonstrasi dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo kecamatan porong kabupaten sidoarjo setelah melihat bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. lapindo brantas yang relita dilapangan mengalami tersendat-sendat dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, maka muncullah sebuah kekecewaan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh masyarakat korban lumpur lapindo terhadap struktur yang ada. Sebagaimana dalam teori ketegangan struktural dijelaskan bahwa "penolakan tindakan-tindakan terhadap hubungan-hubungan struktur yang ada dan berada secara independen dari motivasi-motivasi individual".

Akhirnya masyarakat korban lumpur lapindo ke Jakarta menuntut relokasi penuh.

Dalam melakukan gerakannya, masyarakat korban lumpur lapindo menggunakan beberapa pola antara lain:

1) Pola Irasional.

Pada pola ini terjadi sebuah gerakan kemasyarakatan yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo dengan memasang sepanduk di tanggul pusat semburan yang meminta supaya semburan lumpur Lapindo ditutup dan juga melakukan ritual-ritual mistik mulai dari menyembelih ayam hitam pekat, domba Sembilan sampai menyeburkan sapi ke pusat semburan dan juga ada yang melakukan istighosah seperti apa yang terjadi pada 4 tahun peringatan lumpur lapindo di Gor Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pola ini masyarakat mencoba mempertahankan desa mereka, tempat tinggal dan mata pencaharian mereka dari kemusnahan akibat dari semburan Lumpur Lapindo, beragam dasar dan prinsip bertahan menjadi landasan bagi masyarakat Porong dalam menuntut PT. Lapindo Berantas, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Pusat agar segera menyumpat atau menghentikan semburan Lumpur Lapindo, dampak dari gerakan masyarakat korban Lumpur Lapindo inilah sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Oleh Pemerintah Pusat.

2) Pola Rasional

Pada pola ini masyarakat korban lumpur lapindo dalam melakukan gerakan menuntut ganti rugi kepada PT. Lapindo Brantas, yang mana pada kesempatan ini para korban lumpur lapindo yang tergabung dalam gerakan masyarakat korban lumpur lapindo (GMKLL) yang didalamnya terdiri atas beberapa elemen (FPPLS, GEMPUR, KKN, MPRS, IPNU, MWCNU, WARGA dan Kepala Desa).[19] Mengadakan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindo - PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 bertempat dipendopo Kabupaten Sidoarjo.yang mana hasil dari pertemuan di pendopo ini menjadi sebuah keputusan presiden nomor 14 tahun 2007. Pada tahapan ini dilakukan oleh masyarakat korban lumpur lapindob dikarenakan masyarakat melihat bahwa menutup semburan lumpur tidak mungkin dapat dilakukan.

---

[19] H. Pain Ghazali, Kepala Desa Siring, Kecamatan Porong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pola ini masyarakat korban Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo issu gerakannya sudah mengarah pada penyelamatan masyarakat korban Lumpur Lapindo dan tuntutan ganti rugi terhadap tanah dan bangunan yang sudah terendam lumpur, pada pola ini masyarakat Porong sudah terbentuk sebuah organisasi gerakan yang lengkap dengan perangkat aksinya. Hasil dari gerakan kemasyarakatan inilah pihak PT. Lapindo Berantas memenuhi tuntutan masyarakat korban Lumpur Lapindo dengan memberikan santunan tiap bulan dan membayar ganti rugi tanah dan bangunan masyarakat mereka secara penuh. Akan tetapi secara teknis pembayaran tahap ke-1 20% dan tahap ke-2 80%.

3) Pola Dekonstruksi

Masyarakat korban lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sebuah gerakan karena mereka menggangap gerakan yang dulu pernah dilakukan dengan menuntut ganti rugi secara penuh tidak sesuai karena pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Perpres no.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo (BPLS) menyatakan, dana jual beli dilakukan dengan cara bertahap, sebanyak 20% dibayar di muka, dan sisanya paling lambat dibayar sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis yaitu 80% .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kesepakatan yang pernah dibuat dilapangan tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat korban lumpur lapindo dan sisa pembayaran yang 80% menjadi tersendat-sendat.

Dalam prakteknya pihak PT. Lapindo Brantas dalam pembayaran ganti rugi dirasakan masyarakat korban Lumpur Lapindo sudah tidak relevan dengan komitmen tentang mekanisme pembayaran ganti rugi, akhirnya masyarakat korban Lumpur Lapindo melakukan sebuah gerakan menuntut pembatalan perjanjian ganti rugi dan meminta PT. Lapindo Brantas untuk melakukan relokasi penuh terhadap wilayah yang terkena dampak dari luberan Lumpur Lapindo.

Sebelum melakukan sebuah gerakan kemasyarakatan masyarakat korban lumpur lapindo melakukan beberapa proses untuk menunjangterjadinya sebuah gerakan yaitu:

a) Sosialisasi

Bahwa pada kenyataannya semburan lumpur yang terjadi karena adanya pengeboran minyak oleh Lapindo Brantas disebabkan oleh kelalaian perusahaan.

Dampak dari semburan lumpur Lapindo berimbas pada berubahnya pranata-pranata sosial yang ada di tempat tersebut. Dampak – dampak yang dirasakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat akan bahaya lumpur Lapindo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses sosialisasi ini (penyadaran) di samping muncul dari internal masyarakat setempat, juga di pengaruhi dari eksternal melalui peran Lembaga swadaya yang terlibat aktif dalam membantu korban semburan lumpur.

b) Mobilisasi

Perubahan – perubahan pranata sosial yang terjadi di masyarakat karena disebabkan adanya bencana semburan lumpur Lapindo menyebabkan masyarakat melakukan mobilisasi dengan cara membentuk elemen masyarakat korban semburan lumpur, setelah itu masyarakat melakukan aliansi – aliansi dengan menggunakan symbol – symbol untuk memperjuangkan hak mereka.

c) Aksi

Aliansi – aliansi yang dilakukan oleh masyarakat korban semburan lumpur mengarah pada gerakan - gerakan aktif dengan issu penutupan semburan, pembayaran ganti rugi (*cash and carry*) dan relokasi penuh.

Aksi ini dilakukan masyarakat korban semburan lumpur melalui tahapan – tahapan mediasi dengan Pemerintah Daerah Tk.II,Pemerintah Daerah Tk.I sampai Pemerintah pusat, disamping itu juga dilakukan mediasi dengan PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aksi masyarakat korban semburan tidak hanya berhenti pada mediasi saja, akan tetapi juga melalui demonstrasi kepada seluruh lapisan Pemerintahan dari Daerah sampai pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bentuk gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo adalah:

   a) Musyawarah

   Musyawarah dilakukan oleh masyarakat korban lumpur Lapindo dengan PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Daerah Sidoarjo

   b) Demonstrasi

   Demonstrasi dilakukan setelah mengamati dan melihat proses pemberian ganti rugi yang diberikan mengalami tersendat-sendat. Dalam melakukan gerakan ada tiga pola yang di pakai yakni:

   a. Pola Irasional.

   Pada pola ini masyarakat korban lumpur Lapindo dengan tanpa henti-hentinya mengelar spanduk di tanggul pusat semburan yang meminta pemerintah bertindak supaya semburan lumpur dengan cepat ditutup.

   b. Pola Rasional.

   Pada pola ini masyarakat dalam melakukan gerakan meminta ganti rugi kepada PT. Lapindo Brantas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pola Dekonstruksi.

Pada pola ini, masyarakat Porong menganggap gerakan yang dulu tidak sesuai, dan berkembang menjadi sebuah gerakan menuntut relokasi penuh.

2. Proses gerakan kemasyarakatan yang terjadi pada masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

a) Sosialisasi.

Proses sosialisasi ini (penyadaran) di samping muncul dari internal masyarakat setempat, juga di pengaruhi dari eksternal melalui peran Lembaga swadaya yang terlibat aktif dalam membantu korban semburan lumpur.

b) Mobilisasi

Masyarakat melakukan mobilisasi dengan cara membentuk elemen masyarakat korban semburan Lumpur lapindo, dan melakukan aliansi – aliansi dengan menggunakan symbol – symbol untuk memperjuangkan hak mereka.

c) Aksi.

Aksi ini dilakukan masyarakat korban semburan lumpur melalui tahapan – tahapan mediasi dengan Pemerintah Daerah Tk.II,Pemerintah Daerah Tk.I sampai Pemerintah pusat, dan PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aksi tidak hanya berhenti disini saja akan tetapi juga melalui demonstrasi kepada seluruh lapisan Pemerintahan dari Daerah sampai pusat.

B. Saran

1. Bagi semua masyarakat Indonesia yang melakukan gerakan kemasyarakatan khususnya masyarakat korban lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat tertindas mari kita bangkit dan berjuang demi hak-hak kita semua, desa kita lingkungan kita dan anak cucu kita semua jangan menyerah dan kalah dalam melawan dan mempertahankan hak kita. Jika ada tekat untuk berubah pastilah ada jalan yang bisa mengarahkan kita pada keberhasilan.

   Saran-saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Meminta kepada pihak PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengutamakan kepentingan umum.

b. Perlu adanya kesamaan pikiran antara PT. Lapindo Brantas - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat korban lumpur lapindo dalam mengkaji dan mentelaah Keputusan Presiden Nomer 14 Tahun 2007 tentang Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLLS).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abd. Rozak, Dasar-dasar advertising,Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2008)

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format – format Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Surabaya : AUP, 2001)

Arikunto Suharsimi. Prof. Dr. 2006. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta. Rineka Cipta

Azra Azyumardi, Prof. Dr. MA. 2000. *"Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani"*, IAIN Press

Arnd, H. W. 1987. *"Pembangunan dan Pemerataan Indonesia Di Masa Orde Baru"*, Jakarta. LP3ES.

Blau M. Peter, Mayer W, Marshall. 1987. *"Birokrasi Dalam Masyarakat Madani"*, Jakarta. LP3ES.

Moleong J. Lexy, 2002. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Soekanto Soerjana, Prof. Dr. S.H,M.A. 1993. *"Struktur Masyarakat"*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Abustam Muhammad Idrus. 1989. *"Gerakan Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial"*, Jakarta. UI-Press

Poerwadarminta W.J.S 1985. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), Balai Pustaka

Mayeroff Milton, 1993. *"Mendampingi Untuk Menumbuhkan"* Yogyakarta: Kanisius

Arikunto Suharsimi, 1989 *"Prosedur Penelitian Suatu Pengantar"* Jakarta : Bina Aksara

Abdurrahman Dudung, 1998. *"Pengantar Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah"* Yogyakarta : IFKA PRES

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi Sutrisno, 1984. "*Metodologi Research* II, Yogyakarta : Psikologi UGM
Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* (TerjemahanAlimandan). Jakarta : Rineka Cipta

Mirsel Robert , 2004 " *Teori pergerakan sosial,* Yogyakarta, Resist Book.

Beccali Bianca "*The Modern Women's Movement*" in italy, *New Left Review*

Snow, David, dan Robert Benfort 2004 "*Ideology, Frame Resonance and Participan Mobilization*" dalam Mirsel Robert, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta, Resist Book.

Gold Jack, 1991 "Ideology, *Cultural Frameworks, and The Process of revolotion*" Theory and Society.

Tarrow, Sidney 1988, "*Democracy and Disorder Protest and Politic*" *In Italy 1965-1975 New York Oxford University press*

Ritzer Gorge, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda,* Jakarta: Rajawali Press

Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka 1994)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

www. Sidoarjokab.go.co.id
Soenyono, Teori-teori Gerakan Sosial, (Surabaya, Yayasan Kampusium, 2005). h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id